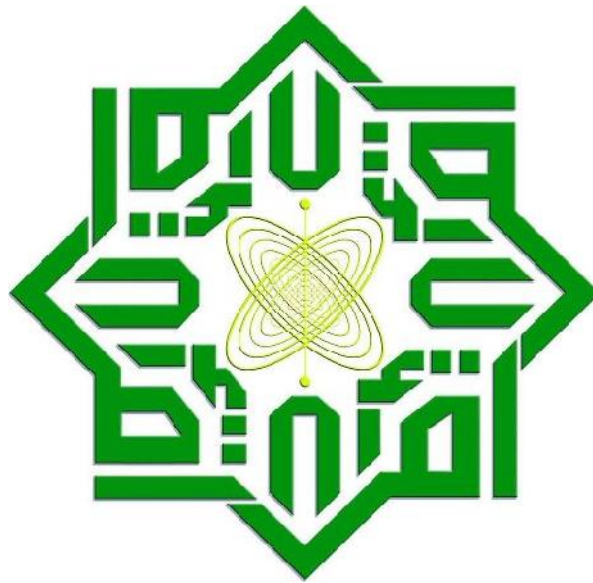


# **PROPOSAL**

**ANALISIS PERAN KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR  
DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA  
TELUK PAMBANG KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS**



Oleh :

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

**NIM : 10875004314**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2012**

**ANALISIS PERAN KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR  
DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA TELUK  
PAMBANG KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

---

*Kepala Desa merupakan pemimpin dari penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari pengaruh seorang kepala desa di desa tersebut. Akibatnya, kepala desa harus mampu memposisikan perannya dalam pemerintahan desa tersebut. Keadaan di Desa Teluk Pambang pada saat ini, dimana peran kepala desa dalam pembangunan kurang terwujud secara baik sehingga pembangunan kurang berjalan secara mestinya. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa sebagai administrator dalam pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisa kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat desa teluk pambang kecamatan bantan kabupaten bengkalis yang berjumlah 1484 KK dengan menggunakan rumus slovin maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 94 KK. Dari hasil analisa penelitian ini didapatkan bahwa peran kepala desa sebagai administrator dalam pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tergolong Tidak Baik dengan skor rata-rata 1117,6. Hasil ini didapat dari 5 subvariabel yang di jadikan bahan penelitian yaitu membuat perencanaan pembangunan, memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan, mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan, mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Segala puji dan Syukur kehadiratMU ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi ummat-Nya. Shalawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

*Alhamdulillahirobbil'alamin* atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **ANILISIS PERAN KEPALA DESA SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN FISIK DESA DIDESA TELUK PAMBANG KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS** ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Administrasi Negara fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan motivasi, bantuan, bimbingan dan arahan, serta adanya kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Syahdan dan Yuliani yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang sehingga penulis bisa menjalani hidup dan dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim.

2. Sanak keluarga penulis (keluarga besar) yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis
3. Bapak Prof. DR. H.M. Nazir, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau
4. Bapak Mahendra Romus, M.Ec, P.hd selaku Dekan fakuyultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, serta pejabat dekanat.
5. Bapak Drs. Almasri, M.Si., selaku ketua jurusan dan Bapak Rusdi S.Sos selak Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, menyumbangkan pemikiran, memberikan saran, dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Mamuzar, M.Hum selaku penguji I dan pak Mashuri, MA sebgai penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk penulis.
8. Bapak dan ibu dosen Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta karyawan dan karyawanati yang membantu penulis dalam setiap urusan yang menyangkut dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada orang yang sangat spesial yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik itu di waktu suka dan duka yaitu Widya Wati, terima kasih ya sayang..... Semoga usaha kita diberi balasan yang setimpal oleh Allah SWT...Aminnnnn.....

10. Sahabat dan rekan-rekan jurusan administrasi negara khususnya lokal B yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, semoga kita dapat menjadi generasi yang di harapkan oleh bangsa kita... oke brooo...

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan segala kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin dengan penuh harapan agar kiranya dapat berguna bagi pembaca.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang berkaitan dengan keilmuan maupun dapat menjadi studi literatur bagi penelitian yang berhubungan.

Pekanbaru, Oktober 2012

Penulis

Muhhamad Irwansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	8
2.2 Definisi Konsep .....	29
2.3 Variabel Penelitian .....	30
2.4 Kerangka Berfikir .....	31
2.5 Teknik Pengukuran.....	31
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3 Populasi dan Sampel	
3.3.1 Populasi .....	36
3.3.2 Sampel .....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5 Teknik Analisa Data .....	39

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Keadaan Geografis .....	41
4.2 Penduduk .....	42
4.3 Pendidikan .....	43
4.4 Agama.....	44
4.5 Mata Pencaharian .....	45
4.6 Pemerintah Desa .....	46

#### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Identitas Responden.....	49
5.2 Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan.....	56
5.3 Rekapitulasi Setiap Sub Variabel .....	81
5.4 Rekapitulasi Seluruh Sub Variabel.....	91

#### **BAB VI: PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Saran .....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pembangunan Fisik Desa di Desa Teluk Pambang tahun 2010-2011	4
Tabel 4.1. Penggunaan Lahan Desa Teluk Pambang .....	41.
Tabel 4.2. Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis .....	42
Tabel 4.3. Penduduk Berdasarkan Umur .....	43
Tabel 4.4. Sarana PendidikanDesa Teluk Pambang .....	44
Tabel 4.5. Penduduk Berdasarkan agama yang dianut .....	45
Tabel 4.6. Mata Pencarian Penduduk Desa Teluk Pambang.....	45
Tabel 5.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 5.2. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	51
Tabel 5.3. Jumlah Respondemn Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 5.4. Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencahariannya.....	53
Tabel 5.5. Jumlah responden Berdasarkan suku Bangsa .....	55
Tabel 5.6. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memberikan Tujuan Pembangunan .....	57
Tabel 5.7. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memberikan Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembangunan .....	58
Tabel 5.8. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Melakukan Musyawarah Untuk Merumuskan Perencanaan Pembangunan .....	59
Tabel 5.9. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Pada Saat Musyawarah.....	60
Tabel 5.10. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Menanggapi saran dan Usulan dari Masyarakat .....	61
Tabel 5.11. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Mengikutsertakan masyarakat untuk Berpartisipasi .....	62
Tabel 5.12. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Mengendalikan Aparat Dan Masyarakat Desa.....	63
Tabel 5.13. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Aparat Dan Masyarakat Desa.....	64
Tabel 5.14. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Membentuk Kelompok-Kelompok pada Pelaksanaan pembangunan .....	65



Tabel 5.15. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam menggerakan Partisipasi Masyarakat.....	65
Tabel 5.16. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Mangadakan Musyawarah saat mengambil Keputusan.....	67
Tabel 5.17. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Meminta Saran dan Usulan dari Masyarakat.....	68
Tabel 5.18. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memberikan Alternatif-Alternatif .....	69
Tabel 5.19. Tanggapan Responden Tentang Keputusan yang diambil berdasarkan saran dan usulan dari masyarakat.....	70
Tabel 5.20. Tanggapan Responden Tentang Ketegasan Kepala Desa Dengan Keputusannya .....	71
Tabel 5.21. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Pembagian Tugas pada Aparat Desa .....	72
Tabel 5.22. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Pembagian Tugas pada Masyarakat Desa .....	73
Tabel 5.23. Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan tugas Dari Kepala Desa	73
Tabel 5.24. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Membantu Secara Langsung Pada Pelaksanaan Pembangunan .....	74
Tabel 5.25. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memfasilitasi Sarana Dan Prasarana Pembangunan .....	75
Tabel 5.26. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Mendatangi Lokasi Pembxangunan .....	77
Tabel 5.27. Tanggapan responden tentang penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan.....	78
Tabel 5.28. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memberikan Jalan keluar Terhadap Kendala/Penyimpangan .....	79
Tabel 5.29. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Orang yang Melakukan Penyimnpangan.....	80
Tabel 5.30. Tanggapan Responden Tentang Kepala Desa Dalam Memeriksa Kelayakan Materi Bangunan.....	81

Tabel 5.31. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Membuat Perencanaan Pembangunan .....	82
Tabel 5.32. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan dalam pelaksanaan Pembangunan ...	84
Tabel 5.33. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Dalam Mengambil keputusan pada Proses Penyelenggaraan .....	86
Tabel 5.34. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan .....	88
Tabel 5.35. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Mengawasi Aktivitas-Aktivitas dalam Proses Penyelenggaraan .....	90
Tabel 5.36. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa Sebagai administrator Pembangunan Fisik Desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	91

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem administrasi atau pemerintahan Negara di Indonesia mengacu pada UUD 1945. Dalam perjalannya telah terjadi beberapa kali perubahan sistem politik, yang berarti juga perubahan UUD , dimulai dari UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), hingga UUD sementara 1950, dan kemudian pada tahun 1959 kembali lagi pada UUD 1945 termasuk pancasila serta pokok-pokok pikiran mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, dengan demikian Indonesia hanya dikenal memiliki satu lembaga penyelenggaraan pemerintah, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 dikenal adanya pembagian daerah-daerah otonom selain daerah administratif. Daerah otonom tersebut adalah daerah provinsi, didaerah provinsi terdiri dari kabupaten dan dibawahnya terdapat pemerintahan desa.

Pemerintahan desa berkedudukan di Kecamatan dan bersifat otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan di desa tentu harus adanya dukungan dari aparat desa yang

mengerti dan memahami tugas serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dan mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara profesional dan tanggung jawab.

Kepala desa merupakan pimpinan dalam pemerintahan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan tidak terlepas dari pengaruh peran pemimpin di desa yaitu Kepala Desa. Jika kepala desa tidak berperan sebagaimana mestinya, maka proses dan hasil dari pembangunan tersebut tidak akan baik, karna Kepala Desa disini bertindak sebagai penggerak suatu pembangunan (khususnya pembangunan fisik desa). Beberapa peran Kepala Desa sebagai penggerak pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan pembangunan.
2. Memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan.
3. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
4. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan
5. Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan

Dari peran kepala desa tersebut, pembangunan adalah salah satu hal pokok yang harus dipikul oleh kepala desa. Karena pembangunan merupakan bagian dari proses pemerintahan desa.

Sebagai pemerintahan desa yang demokrasi, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan menetapkan peraturan bersama kepala desa, selain Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), dapat pula dibentuk lembaga-lembaga lain yang ditetapkan berdasarkan UUD 1945, diantaranya adalah RW, RT, PKK dan lain-lain.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa, oleh karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Kepala Desa merupakan aktor sentral dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga untuk menjadi kepala Desa harus memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kepala desa di Desa Teluk Pambang ini telah berusia sekitar 40 tahun, dan pendidikannya berakhir ditingkat SLTA. Kepala Desa Teluk Pambang ini, telah lama menjabat sebagai kepala desa, terhitung sejak Januari 2006 sampai sekarang.

Dari profil Kepala Desa Teluk Pambang diatas, maka kepala desa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang Kepala Desa. Namun untuk memberdayakan Pemerintahan Desa Kepala Desa harus mampu memposisikan diri dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi seperti ini lah yang biasanya kurang dimengerti oleh Kepala Desa, yang akibatnya akan membuat impian masyarakat hanya tinggal kenangan. Antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi bertolak belakang.

Kondisi umum seperti yang tertera diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Lokasi desa ini relatif dekat  $\pm 60$  km dari Ibu Kota Kabupaten, namun masih dijumpai keadaan dibidang pembangunan desa yang belum terwujud secara baik.

Kurangnya pengkoordinasian kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di desa tidak berjalan dengan semestinya. Adapun pembangunan yang berjalan di Desa Teluk Pambang tahun 2010-2011.

**Tabel 1.1.**  
**Pembangunan Fisik Desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan**  
**Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2011**

No	Tahun	Jenis Pembangunan	Terealisasi
1	2010	Pembangunan Jalan Beton Jl. H. Ahmad 75 m x 3 m	75 %
2	2010	Pembangunan Pintu Klip Air Jl. Sriwijaya	20 %
3	2010	Pembangunan Gedung Majelis Guru MA	20 %
4	2011	Kolam Terpal untuk kelompok Maju Jaya	100 %
5	2011	Pembangunan Pagar Mesjid Al-Ikhsan	0 %
6	2011	Pembangunan Pagar TPU Miftahul Jannah	80 %
7	2011	Duiker 4 Unit	60 %
8	2011	Pembangunan Parit Beton Jl. Sandang Pangan	40 %

*Sumber : Data sekunder kantor desa serta berdasarkan survei tahun 2012*

Jika dilihat dari tabel 1.1. diatas, pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Pambang masih banyak yang belum terealisasi. Dimana kita dapat melihat dalam pembangunan jalan beton yang terletak di jl. H. Ahmad masih belum terealisasi sempurna, namun meskipun belum terealisasi 100% jalan beton tersebut sudah dapat digunakan karena 25% yang belum terselesaikan tersebut hanya 19 m x 3 m, jadi jalan yang dahulu susah dilalui karena becek jika hujan, maka kini sudah dapat digunakan dengan nyaman meskipun belum selesai sempurna. Kemudian pembangunan Pintu Klip Air di Jalan Sri Wijaya hanya 20% yang terealisasi, sehingga pintu klip ini tidak dapat digunakan karena 20% yang terselesaikan itu adalah pondasi klip airnya saja. Pembangunan Pintu Klip Air ini berfungsi untuk

menahan air laut naik ke daratan dan jika pintu klip tersebut tidak tuntas dalam pembangunannya maka banyak sekali tanaman-tanaman yang terganggu pertumbuhannya, seperti tanaman karet, sawit serta tanaman-tanaman lainnya yang tidak tahan terhadap air asin. Kemudian pada pembangunan Gedung Majelis Guru MA sudah 20% dari pembangunannya telah diselesaikan, pembangunan yang telah diselesaikan terletak pada pondasi dan tiang-tiang gedung tersebut, sehingga tidak dapat digunakan. Berbeda halnya dengan pembangunan Kolam Terpal yang dimanfaatkan sebagai tempat ternak ikan lele untuk kelompok Maju Jaya yang telah diselesaikan 100% bahkan telah terdapat sejumlah ikan lele untuk ditenak didalamnya, jadi pembangunan Gedung Majelis Guru MA ini wajib diselesaikan guna menambah vasilitas dalam sekolah tersebut.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pembangunan yang dananya diperoleh dari dana ADD (Anggunan Dana Daerah) yaitu pembangunan pagar mesjid swadaya masyarakat Desa Teluk Pambang yaitu Mesjid Al-Ikhsan sejak awal tahun 2011 hingga memasuki tahun 2012 ini, tidak sedikitpun pembangunan dilakukan. Hal ini diduga terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pembangunannya, sehingga pembangunan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah keasrian, kenyamanan serta keamanan masyarakat setempat sehingga pembangunan ini harus diselesaikan secepatnya.

Ada juga pembangunan yang sudah hampir mendekati kesempurnaan yang memiliki persentase 80 %. Pembangunan ini adalah pembangunan Pagar TPU Miftahul Jannah yang sangat bermanfaat bagi penduduk Desa Teluk Pambang.

20% yang belum terealisasi dalam pembangunan ini terletak pelapisan dinding pagar dan pengecatan. Dengan pembangunan pagar TPU Miftahul Jannah ini, TPU miftahul jannah ini akan terlihat rapi dan terdapat pembatas antara TPU dengan tanah milik warga yang berdekatan. Kemudian pembangunan Duiker 4 Unit pada tahun 2011 ini juga mengalami kendala, dalam pembangunanya baru 3 unit yang terselesaikan dan itupun belum selesai secara sempurna, dapat juga dikatakan bahwa dalam pembangunan Duiker 4 Unit ini masih 60 % yang dapat diselesaikan. Sama halnya dengan Pembangunan Parit Beton Jl. Sandang Pangan yang hanya terselesaikan pondasi dan kerangka betonnya saja yaitu sekitar 40 % dari pembangunannya. Padahal kedua bangunan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa banyak. Duiker di manfaatkan sebagai penghubung jalan beton yang terpisahkan oleh parit yang ukurannya  $\pm 2$  m, sedangkan parit beton di jalan sandang pangan berfungsi sebagai tanggul agar tanah tidak longsor atau abrasi. Jadi, jika kedua pembangunan itu tidak terselesaikan maka banyak kerugian yang diterima oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan pengamatan serta wawancara dengan masyarakat desa yang dilakukan penulis, penulis mendapatkan informasi bahwa kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam ruang lingkup pembangunan desa, kepala desa kurang berkoordinasi dengan perangkat serta masyarakat desa. berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”**.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan ialah “ Bagaimana peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ? ”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi Kepala Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
- b. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Kepala Desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang.
- c. Sebagai sarana untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan ilmiah serta sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam program pembangunan fisik desa.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dapat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih-milih konsep yang tepat yang dapat mendukung pemecahan masalah penelitian penulis.

##### **2.1.1. Otonomi Daerah**

Menurut Widarta ( 2001:2 ) dijelaskan bahwa **otonomi berasal dari bahasa yunani**, yaitu Autos dan Nomos. Autos berarti sendiri, dan Nomos berarti aturan. Otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan repuublik Indonesia.

Sedangkan menurut Sumaryadi (2005 : 48) otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab

badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan perundang-undangan.

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. **Desentralisasi adalah** penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (Nasional) kepada pemerintah lokal atau daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Jadi yang dimaksud otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hal, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

- 1) Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan

2) Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Sumaryadi (2005:64) mengemukakan tujuan pemberian otonomi daerah yang mengemukakan ada tiga hal yang lebih desentralistik yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Pembangunan masyarakat identik dengan peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas sosial yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi.
- c. Pembangunan sosial terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia berbuat. Pembangunan disini merupakan derivasi (penyimpangan) dari paradigma (pedoman) pembangunan berpusat pada manusia/rakyat.

Menurut Josef (2005 : 66-70) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Faktor manusia pelaksana

manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Mekanisme sistem pemerintahan baik Daerah maupun Pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang dikehendaki apabila manusia sebagai subjek yang menggerakkannya baik pula. Pengertian baik disini meliputi:

- 1) Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya dapat bersikap sebagai abdi masyarakat.
- 2) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

b. Faktor keuangan Daerah

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semangkin baik pengelolaannya semangkin berdaya guna uang tersebut.

c. Faktor peralatan

Peralatan disini memiliki arti setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan Pemerintah Daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu Pemerintahan daerah yang baik seperti alat-alat kantor, komunikasi dan transportasi, dan sebagainya. Namun disisi lain, peralatan yang baik tersebut bergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakan.

d. Faktor Organisasi dan Manajemen

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susuna yang terdiri dari satuan organisasi beserta segenap pejabat kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu

tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen disini adalah proses manusia yang mengarahkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

### **2.1.2. Otonomi Desa**

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut UU no. 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003:165) menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah memberikan kelurahan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Desa. masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa) sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonoomi desa, diharapkan Pemerintah Kabupaten secara intesif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi Sumber Daya Alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan Desa tanpa menggabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Memprogramkan pemberian bantuan kepada Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memfasilitasi upaya peniggkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

### **2.1.3. Pemerintahan Desa**

Menurut Widjadja (2003:20)Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa (Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan perangkat desa lainnya), sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat

yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa (PERDES), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tatacara pemilihan diatur oleh PERDA yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan susistem dari system penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatny. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Pengaturan pemerintahan desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/ pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Desa maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri.guna mewujudkan pmberdayaan pemerintahan desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara :

- 1) Penataan dan pengembangan desa, kerjasama antar Desa dan Lembaga Adat.
- 2) Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan Desa dan paguyuban Pemerintahan Desa.



- 3) Peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa .
- 4) Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan Desa.
- 5) Meningkatkan ketahanan masyarakat.
- 6) Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat.
- 7) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- 8) Peningkatan SDA yang berwawasan lingkungan
- 9) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **2.1.4. Peran Kepala Desa**

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran berasal dari kata dasar “peran” yang berarti perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Menurut Rivai (2006 : 2) Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Sedangkan menurut Thoha (2003: 10) peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu.

Menurut Broom (dalam Raho, 2003 : 104-105), peran dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu perspektif prescribed role, perspektif perceived role, perspektif actual role.

a. Perspektif prescribed Role

Perspektif prescribed Role atau peran yang didasarkan pada harapan-harapan masyarakat atau peran yang ideal. Setiap masyarakat pada umumnya mempunyai harapan tertentu dari individu yang menempati status atau posisi social tertentu. Harapan itu pasti berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

b. Perspektif Perceived Role

Perspektif Perceived Role atau peran yang didasarkan pada pertimbangan pribadi. Peran ini mungkin saja tidak sejalan dengan harapan dari masyarakat tetapi harus dilakukannya karena menurut pertimbangan hal itu adalah baik.

c. Perspektif actual Role

Perspektif actual Role atau peran yang didasarkan pada bagaimana peran itu diwujudkan atau diaktualisasikan. Pelaksanaan suatu peran sering kali tidak didasarkan atas harapan-harapan masyarakat atau pertimbangan-pertimbangan pribadi tetapi juga berdasarkan tekanan-tekanan yang dialami atau peluang-peluang yang ada atau dalam situasi tertentu.

Kepala Desa adalah pemimpin dari penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali).

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun dan merupakan penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dimana dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
- c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
- d. Berusia paling rendah 25 tahun
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
- f. Penduduk desa setempat
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun

- h. Tidak dicabut hak pilihnya
- i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Menurut Widjaja (2002 : 45) dalam bukunya “Pemerintahan Desa dan Administrasi desa”, Kepala desa memiliki wewenang, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

Dalam menjalankan berbagai tugas dan kewajiban sebagai pemimpin, maka Kepala Desa juga memiliki berbagai peran yang harus dilakukan dengan baik. Tanpa peran Kepala Desa yang baik maka suatu kegiatan dalam pemerintahan desa tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Maka dari itu, kepala desa harus memahami, apa peran yang harus dilakukan. Menurut Talizuduhu (2005 : 5) peran Kepala Desa sebagai administrator pembangunan desa adalah :

- a. Membuat perencanaan pembangunan.

Dalam hal ini, kepala desa diharapkan mampu berperan secara baik untuk menentukan tujuan pembangunan, menetapkan langkah-langkah dan tanggap

terhadap aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam merumuskan pembangunan desa.

b. Memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan.

Memberikan pengarahan kepada bawahan adalah salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Untuk tercapainya tujuan pembangunan yang baik kepala desa harus mampu menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Kepala Desa dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas Kepala Desa. Sehingga jika Kepala Desa tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin.

Dilain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya.

d. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan.

Untuk menyukseskan tujuan bersama suatu organisasi diperlukan pembinaan tim-tim oleh seorang pemimpin. Sehingga dalam hal pelaksanaan

pembangunan maka diperlukan juga peran dari seorang pemimpin yaitu seorang kepala desa untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan program pembangunan, dengan membentuk tim-tim atau kelompok-kelompok, melakukan pembagian tugas terhadap pihak-pihak terkait (seluruh masyarakat desa setempat).

e. Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan

Pengawasan adalah salah satu kegiatan untuk mengetahui berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya pengawasan, tujuan pembangunan akan sangat sulit dicapai. Oleh karena itu seorang kepala desa harus memiliki kemampuan untuk memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan.

#### **2.1.5. Teori Administrasi**

Teori administrasi secara khas merupakan teori rasionalitas yang diharapkan dan terbatas. Teori mengenai perilaku manusia yang mementingkan kepuasan karena mereka tidak memiliki kecerdasan untuk berusaha mencapai titik maksimum.

Administrasi berasal dari bahasa latin “*Ad*” dan “*ministrate*” yang berarti pemberian jasa atau bantuan, yang dalam bahasa inggris disebut dengan “*administration*” yang berarti “*To Serve*”, yaitu melayani sebaik-baiknya . Pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :

Administrasi dalam arti sempit adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dan melibatkan sebagian orang dalam organisasi untuk mencapai bagian sasaran antara sebagian orang dalam organisasi untuk administrasi sempit ini adalah ketatausahaan (Moenir, 2006 : 78). Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasaranan tertentu.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2004 : 4).

Menurut Hadari ( dalam Inu Kencana. 2003 : 5) mengatakan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha bersama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Siagian (dalam Inu Kencana : 2003 : 5) menyebutkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adminstrasi pada intinya adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dalam suatu organisasi berdasarkan rancana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dan sifat suatu kerjasama dapat bermacam-macam. Demikian juga jumlah dan susunan orang-orang yang bekerja sama dapat berbeda pula. Selanjutnya usaha itu dapat pula berlangsung pada waktu dan tempat yang

berlainan. Tetapi pada setiap kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang pasti terdapat rangkaian kegiatan penataan yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Rangkaian kegiatan penataan ini sebagai suatu kebulatan kini biasanya menjadi fungsi seseorang atau beberapa pejabat. Atau dengan kata lain administrasi sebagai fungsi dijalankan oleh setiap orang yang berkedudukan sebagai pucuk pimpinan suatu usaha kerja sama manusia atau ketua organisasi yang dinamakan administrator. Jadi administrator kepala yang tertinggi di dalam organisasi. Tetapi tidak berarti bahwa administratorlah satu-satunya yang berperan sebagai pelaksana fungsi administrasi, melainkan juga dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang berada dibawahnya berdasarkan pelimpahan dari administrator tadi.

Administrasi yang merupakan rangkaian kegiatan penataan, merupakan pekerjaan penunjang pelaksanaan pekerjaan substansuif. Kelompok pekerjaan yang dilakukan dengan rangkaian kegiatan substansuif dinamakan pekerjaan pokok atau pekerjaan induk yaitu pekerjaan yang langsung bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mengetahui perbedaan antara rangkaian kegiatan penataan dan rangkaian kegiatan substansif diberikan contoh sebagai berikut :

*Proses produksi yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang pabrik, rangkaian perbuatan pekerjaan substansif misalnya : mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan, menjalankan mesin pengolahannya, menambahkan warna yang diperlukan, memotong menjadi sesuatu bentuk dan ukuran sampai barang itu benar-benar selesai. Sedangkan proses penataan misalnya perbuatan-perbuatan memakai tenaga buruh, mengurus keuangan pabrik itu,*



*mengadakan catatan-catatan mengenai hasil produksi serta memperhatikan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap barang yang dihasilkan.*

Albert Lepawsky menunjukkan 6 peran administrasi dalam kehidupan dan perkembangan masyarakat:

#### 1. The Universal Importance of Administration

Bahwa administrasi sebagai studi ilmiah yang serius diperlihatkan dari disintegrasi bagi kurangnya abilitas administrasi dan efisiensi manajemen terutama pada periode Perang Dunia II. Fayol mengatakan, melalui pengetahuan administrasi kita mengerti peran orang, komando, koordinasi dan control yang jadi dasar untuk tenaga kerja (workman). Dengan demikian tiap orang membutuhkan Administrasi sehingga Administrasi adalah suatu subyek dari kepentingan universal.

#### 2. The Stabilizing Role of Administration in Society

Paul pigors menyatakan bahwa fungsi primer administrasi adalah untuk stabilisasi institusi-institusi sosial.

#### 3. The Role Administration in Sosial Change

Brook adam mengatakan bahwa fungsi pokok administrasi adalah jaminan stabilitas sosial dengan sediakan fasilitas bagi perubahan sosial.

#### 4. The Treat of a Managerial Revolution

James burham mengatakan kualitas esensial dari the emerging society adalah karakter manajemennya, bahwa dalam kenyataan manajer-manajer mempersiapkan untuk taken over masyarakat modern.

## 5. The Prospect of a Managerial Evolution

Charles merriem mengatakan bahwa lambat laun akan diberikan atribut posisi manajer dari suatu masyarakat demokratik. Ia menyebut organisasi pemerintahan tidak lain merupakan organisasi manajerial.

## 6. Administration as the Key to Modern Society

Charles A. Besrd : Masyarakat modern adalah masyarakat besar. Setiap usaha masyarakat modern akan mendapatkan ketenangan dibawah.

Unsur-unsur administrasi dalam pelaksanaannya terdiri dari 8 macam yaitu :

- a. Organisasi : adalah unsur pertama dari administrasi yang merupakan wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. Dalam organisasi dikelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan antara para pekerja atau unit-unit tugas.
- b. Manajemen ; adalah rangkaian perbuatan menggerakkan orang-orang dan menggerakkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama betul-betul tercapai.
- c. Komunikasi : adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama yang bersangkutan.
- d. Kepegawaian : rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.
- e. Keuangan : adalah rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.

- f. Perbekalan : adalah rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai penyingkiran benda-benda perlengkapan dalam usaha kerjasama.
- g. Tatausaha : rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan Dalam usaha kerjasama.
- h. Hubungan masyarakat : rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan.

#### **2.1.6. Teori Pembangunan**

Dalam buku Talizi Dahu Ndraha yang berjudul Kybernologi istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun” sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti pertama sadar, kedua bangkit, ketiga bentuk, keempat membuat, kelima mengisi/membina. Terdapat sejumlah konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan tersebut. Konsep itu antara lain adalah pembangunan (*development*), pertumbuhan (*growl*), rekontruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernitation*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social*), pembebasan (*liberation*), perubahan (*innovation*), reformasi (*reformation*), dan penemuan kembali (*konvention*).

*Pembangunan adalah serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan secara sadar yang ditempuh ooleh suatu Negara Bangsa menuju modenitas dalam rangka pembinaan bangsa (national bulding) (siagian, 2001 : 4).*

Menurut Afiffudin (2010 : 42) *pembangunan dapat diartikan dalam 5 arti yaitu perubahan, pertumbuhan, rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, rencana yang tersusun secara rapi, dan cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa.* Menurut Kunarjo (2002 : 24) tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antara daerah. Semua dapat dicapai dengan teknologi tinggi namun di pihak lain pembangunan teknologi dapat merampas kesempatan kerja seseorang. Berarti hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati pendapatannya,. Sedangkan masyarakat lainnya menganggur.

Menurut Murdono (dalam Himat, 2004 : 51) pembangunan ialah suatu proses perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, hal ini harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner melalui beberapa disiplin ilmu yang berorientasikan kepada *people centered development* (memanusiakan manusia) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demokratis dan mengutamakan gender, untuk itu diperlukan perencanaan yang baik agar berjalan secara optimal. Sedangkan menurut Nugroho (2003 : 67) pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga Negara dan dunia internasional dengan menyerap hampir seluruh sumber daya Negara dan bangsa.

Dari berbagai pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk

mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial. Dan merupakan sebuah transformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang digerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

#### **2.1.7. Teori Kepemimpinan**

Permadi menjelaskan dalam bukunya “Pemimpin dan kepemimpinan dalam manajemen sudah menjadi keharusan bahwa setiap persekutuan masyarakat terdapat unsur kepemimpinan. Secara etimologis “Pemimpin” dan “Kepemimpinan” itu berasal dari kata “Pimpin”, maka dengan kojugasi berubah menjadi “Pemimpin” (*Leader*) dan “Kepemimpinan” (*Leadership*).

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu didalamnya ada dua pihak yang bersangkutan yaitu yang dipimpin dan yang memimpin. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan ini Rasulullah SAW. Mengingatkan bahwa :

*Dari Abdurrahman bin Samurah r.a. katanya ; Rasulullah bersabda kepadaku, “Hai Abdurrahman ! janganlah engkau meminta-minta hendak jadi pembesar atau pemimpin Negara. Karena jika engkau jadi pembesar karena permintaan, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat*

*tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu(Shahihul Muslim).*

Dalam Al-Qur'an juga dikatakan :

*“Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”(Al-Baqarah : 30)*

Dalam bahasa Indonesia “pemimpin” sering juga disebut penghulu, pemuka, pelopor, Pembina, penutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Dan setiap pemimpin akan menjalankan fungsi kepemimpinan, dimana dalam pemerintahan desa yang menjadi pemimpinnya adalah kepala desa.

Slamet (2002: 29) juga memberikan pengertian bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Oemar (2002 : 224) kepemimpinan adalah suatu proses pemberian petunjuk dan pengaruh kepada anggota kelompok atau organisasi dalam melakukan tugas-tugas. Selanjutnya menurut Oemar (2000:165) menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai tiga defenisi penting :

- a. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain yaitu bawahan, keberadaan orang lain tersebut menyebabkan kedudukan seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan nampak pada perbedaan kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin.
- c. Situasi, yaitu keadaan situasi dan kondisi masyarakat yang dipimpin selalu berubah-ubah.

Menurut Rivai (2004 ; 2) dalam bukunya yang berjudul “*Kepemimpinan dan perilaku organisasional*”, menyatakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Hendri (2003 ; 93) dalam bukunya yang berjudul “*manajemen motivasi*”. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak dengan bentuk perintah, bimbingan, arahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin selama tidak keluar dari aturan yang berlaku.

Dari beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan juga sering dikatakan sebagai bakat dimana kadang

kalanya seorang secara tidak disadari dan tanpa dipelajari seseorang dapat menjalankan secara sukses.

## **2.2. Definisi Konsep**

Secara umum konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya, atau dapat juga diartikan bahwa suatu konsep itu adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Maka definisi dari beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa
- d. Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.
- e. Kepala Desa adalah pemimpin dari penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- f. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.



- g. Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan tau kehidupan sosial.
- h. Kemimpinan dapat diartikan sebagi kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi prilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui prilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **2.3. Variabel Penelitian**

Pada penilaian diatas penulis akan membahas masalah yang sedang di hadapi dalam masyarakat setempat dengan melihat beberapa aspek yang termasuk ke dalam variabel-variabel penelitian. Adapun variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat, namun di sini penulis hanya menggunakan variabel bebas.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah “Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa” adapun peran-peran kepala desa sebagai administrator pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan pembangunan.
- b. Memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan.
- c. Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
- d. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan fisik desa

- ## 2.4. Kerangka Berfikir

```
graph TD; BPD[BPD] -.-> PKD[Peran Kepala Desa sebagai administrator Pembangunan]; PKD --> MP[Membuat perencanaan pembangunan]; PKD --> MP2[Memberi pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan]; PKD --> MK[Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan]; MP --> M1[Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan]; MP2 --> M1; MP2 --> M2[Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan]; MK --> M2; M1 --> M[Manfaat]; M2 --> M; M --> R[Masyarakat lebih terorganisir dalam pembangunan yang dilaksanakan dengan adanya peran yang dimiliki oleh kepala desa serta terciptanya kedisiplinan yang tinggi.];
```

## 2.5. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah penulisan dan menganalisa permasalahan maka digunakan teknik pengukuran peran kepala desa sebagai administrator pembangunan, yaitu tugas yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berada didaerahnya. Peran kepala desa menurut variabelnya adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan dalam membuat perencanaan pembangunan yaitu kemampuan seorang kepala desa yang menunjukan perilaku antara lain :

- 1) Menentukan tujuan pembangunan
- 2) Menetapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan
- 3) Melakukan musyawarah dalam merumuskan perencanaan pembangunan
- 4) Melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan
- 5) Tanggap dengan aspirasi masyarakat

Pengukurannya :

Sangat Baik : Kepala desa mampu memenuhi semua karakter diatas

Baik : Kepala desa kurang mampu memenuhi karakter diatas

Tidak baik : Kepala desa belum mampu memenuhi karakter diatas

Sangat tidak baik : Kepala desa tidak mampu memenuhi karakter diatas

- b. Kemampuan memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kemampuan kepala desa dalam menunjukan perilaku antara lain :

- 1) Mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi penuh

- 2) Mengendalikan masyarakat
- 3) Memberikan arahan / komando kepada masyarakat
- 4) Membentuk kelompok-kelompok pelaksana

Pengukurannya :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Sangat Baik       | : Kepala desa mampu memenuhi semua karakter diatas  |
| Baik              | : Kepala desa kurang mampu memenuhi karakter diatas |
| Tidak baik        | : Kepala desa belum mampu memenuhi karakter diatas  |
| Sangat tidak baik | : Kepala desa tidak mampu memenuhi karakter diatas  |

c. Kemampuan mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yaitu kemampuan kepala desa dalam menunjukan perilaku sebagai berikut :

- 1) Mengadakan musyawarah
- 2) Meminta saran dan usulan kepada masyarakat
- 3) Memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi
- 4) Keputusan berdasarkan saran dan usulan dari aparat dan masyarakat desa
- 5) Tegas dalam mengambil keputusan

Pengukurannya :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Sangat Baik       | : Kepala desa mampu memenuhi semua karakter diatas  |
| Baik              | : Kepala desa kurang mampu memenuhi karakter diatas |
| Tidak baik        | : Kepala desa belum mampu memenuhi karakter diatas  |
| Sangat tidak baik | : Kepala desa tidak mampu memenuhi karakter diatas  |

d. Kemampuan mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan yaitu kemampuan kepala desa dalam menunjukan perilaku antara lain adalah :

- 1) Melakukan pembagian tugas kepada aparat desa
- 2) Melakukan pembagian tugas terhadap masyarakat desa
- 3) Ikut terjun langsung dalam pelaksanaan pembangunan
- 4) Memfasilitasi sarana dan prasarana

Pengukurannya :

Sangat Baik : Kepala desa mampu memenuhi semua karakter diatas

Baik : Kepala desa kurang mampu memenuhi karakter diatas

Tidak baik : Kepala desa belum mampu memenuhi karakter diatas

Sangat tidak baik : Kepala desa tidak mampu memenuhi karakter diatas

- e. Kemampuan mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan untuk memonitor kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan perilaku berikut ini :

- 1) Mendatangi lokasi pelaksanaan pembangunan
- 2) Memberikan jalan keluar terhadap kendala
- 3) Memberikan sanksi dan peringatan kepada pelaku penyimpangan
- 4) Memeriksa tingkat kelayakan materi bangunan

Pengukurannya :

Sangat Baik : Kepala desa mampu memenuhi semua karakter diatas

Baik : Kepala desa kurang mampu memenuhi karakter diatas

Tidak baik : Kepala desa belum mampu memenuhi karakter diatas

Sangat tidak baik : Kepala desa tidak mampu memenuhi karakter diatas

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dimana yang menjadi dasar pertimbangan untuk dijadikan sebagai objek adalah kurang berkembangnya pembangunan yang dilakukan, khususnya pembangunan fisik seperti sarana dan presarana masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2012 hingga selesai.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data atau keterangan yang didapat langsung dari responden melalui wawancara dan pedoman kuisisioneryangtelah disiapkan terlebih dahulu, serta yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang peran kepala desa sebagai administrator dalam proses pembangunan fisik desa.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Teluk Pambang yang merupakan data yang telah diolah seperti gambaran umum daerah penelitian atau keadaan desa dan struktur organisasi.

### **3.3. Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Pengertian lain mengatakan bahwa populasi adalah sekelompok subyek, baik manusia, gejala, nilai test, benda-benda ataupun peristiwa. Selanjutnya ia juga mengemukakan bahwa populasi adalah individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Aparat Pemerintahan Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ) dan masyarakat Desa Teluk Pambang sebanyak 1484 KK.

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi disebabkan populasi adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian.

Adapun cara yang dipakai untuk menentukan jumlah sampel dari masyarakat yaitu dengan menggunakan rumus Slovin ( dalam umar, 2005 : 146)

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bias ditolerir.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{1479}{1 + 1479 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1479}{1 + 1479 (0,01)}$$

$$n = \frac{1479}{15,79}$$

$$n = 93,67$$

$$n = 94 \text{ KK}$$

Jadi dari perhitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 1479 KK, dengan kelonggaran 0,1, maka hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapatkan sampel sebanyak 93,67 KK yang dibulatkan menjadi 94 KK. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya untuk memperoleh data dan mengamati objek yang ada, juga untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, pengumpulan data yang dilakukan adalah :



#### **3.4.1. Observasi**

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengobservasi pembangunan yang ada di Desa Teluk Pambang. Dari sekian pembangunan yang telah penulis lihat, masih banyak sekali pembangunan yang belum terealisasi.

#### **3.4.2. Wawancara**

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada subjek yang memegang kunci informasi saja yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua beserta Wakil Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Urusan Pembangunan. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan yang ada serta untuk mendapatkan data-data sekunder dari Kantor Kepala Desa seperti struktur organisasi pemerintahan desa dan data pembangunan.

### **3.4.3. Kuisisioner**

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Kuisisioner ini dilakukan penulis terhadap warga Desa Teluk Pambang yang telah dijadikan sebagai sampel penelitian sebanyak 94 KK. Angket dalam kuisisioner ini berisikan tentang pertanyaan seputar proses pembangunan yang dilaksanakan di Desa Teluk Pambang serta bagaimana peran Kepala Desa sebagai penggerak pembangunan di Desa Teluk Pambang.

### **3.5. Teknik Analisa Data**

Teknik menganalisa data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang didapatkan baik data sekunder maupun data primer. Pengelompokan data ini berdasarkan jenisnya masing-masing dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan membahas data tersebut serta menghubungkannya dengan keadaan sebenarnya dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan berdasarkan persentase dari indikator variabel penelitian, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Dimana

P : Tingkat persentase

f : Jumlah skor hasil pengumpulan data

N : Jumlah skor ideal (kriterium)

Kriteria tingkat persetujuan tentang peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa bertitik tolak pada skala pengukuran 4 interval berdasarkan (Husaini Usman, 2009:146) sebagai berikut :

- a. 76% - 100% = Sangat Baik
- b. 51% - 75% = Baik
- c. 26% - 50% = Tidak Baik
- d. 0% - 25% = Sangat Tidak Baik

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 4.1. Keadaan Geografis

Desa Teluk Pambang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Desa Teluk Pambang memiliki wilayah seluas 2622,669 hektar (ha), sebagian besar terdiri dari tanah pemukiman, perkebunan, fasilitas umum desa, dan tanah basah. Untuk lebih jelasnya persentase penggunaan lahan Desa Teluk Pambang pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1.**  
**Persentase Penggunaan Lahan Desa Teluk Pambang**  
**Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

No	Penggunaan	Luas ( ha)	Persentase (%)
1	Tanah Kering	2.327	88,73
2	Tanah Basah	277	10,56
3	Tanah Perkebunan	18, 169	0,69
4	Tanah Fasilitas Umum	0,5	0,02
<b>Jumlah</b>		<b>2622,669</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lahan Desa Teluk Pambang sebagian besar digunakan sebagai tanah kering yaitu sebagai tanah pemukiman seluas 2.327 ha dengan persentase 88,73 %, untuk penggunaan tanah basah seperti rawa dan tanah pasang surut seluas 277 ha dengan persentase 10,56 %, kemudian tanah perkebunan seperti tanah perkebunan rakyat dan tanah perkebunan swasta seluas 18,169 dengan persentase 0,69 %, dan fasilitas umum seperti tanah perkantoran pemerintah hanya memiliki lahan seluas 0,5 ha dengan persentase 0,02 %.

Desa Teluk pambang terletak di sebelah timur ibukota Kecamatan Bantan. Adapun batas wilayah Desa Teluk Pambang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa muntai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa kembung luar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa pematang duku
- d. Sebelah timur berbatasan dengan laut selat melaka

#### 4.2. Penduduk

Penduduk desa teluk pambang menurut profil desa tahun 2011 berjumlah 5453 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2786 orang, perempuan sebanyak 2667 orang, janda sebanyak 194 orang dan duda sebanyak 54 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1484 kk. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis dan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis**

No	Suku/Etnis	Jumlah	Persentase (%)
1	Jawa	3168	58,10
2	Melayu	1390	25,49
3	Tionghoa	63	1,15
4	Batak	2	0,04
5	Bugis	5	0.09
6	Asli/akit	825	15,13
<b>Jumlah</b>		<b>5453</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa suku yang menempati Desa Teluk Pambang mayoritas adalah suku jawa dengan jumlah orang sebanyak 3168 dengan persentase 58,10 %, sedangkan suku batak adalah suku yang paling sedikit dengan jumlah 2 orang atau 0,04 % dari jumlah penduduk Desa Teluk Pambang.

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan umur**

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 4	260	4,76802
2	5 – 6	259	4,74968
3	7 – 12	863	15,82615
4	13 – 16	151	2,76912
5	17 – 18	78	1,43041
6	19 – 25	242	4,43792
7	26 – 35	287	5,26316
8	36 – 45	1939	35,55841
9	46 – 50	877	16,08289
10	51 – 60	180	3,30094
11	61 – 75	230	4,21786
12	>75	87	1,59545
<b>Jumlah</b>		<b>5453</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Teluk Pambang dominan ditempati oleh penduduk yang berusia antara 36 tahun sampai dengan 45 tahun dengan jumlah sebanyak 1939 orang , sedangkan penduduk yang paling sedikit berusia antara 17 sampai 18 tahun sebanyak 78 orang.

#### **4.3. Pendidikan**

Sarana pendidikan ini sangat penting keberadaanya, karena berkembangnya suatu daerah terlihat dari tersedianya sarana pendidikan baik formal maupun informal. Pendidikan dijadikan sebagai ajang untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial ekonomi bagi masyarakat. Perkembangan pendidikan penduduk Desa Teluk Pambang dapat dikatakan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Selebihnya

penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 65 tahun dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak terdapat sarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Jenis Sarana Pendidikan di Desa Teluk Pambang**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	SLTA/Sederajat	2 Unit
2	SLTP/Sederajat	2 Unit
3	SD/Sederajat	11 Unit
4	TK	1 Unit
5	TPA	23 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>39 Unit</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Teluk Pambang sudah memadai dilihat dari dengan adanya 2 unit SLTA/Sederajat, 2 unit SLTP/Sederajat, 11 unit SD/sederajat, 1 unit TK, dan 23 unit TPA. Dan dapat dikatakan bahwa pendidikan masyarakat Desa Teluk Pambang sudah mulai semakin membaik.

#### **4.4. Agama**

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Jumlah Masyarakat Desa Berdasarkan Agama yang Dianut**

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	4329	79,39
2	Budha	1114	20,43
3	Kristen	10	0,18
<b>Jumlah</b>		<b>5453</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Teluk Pambang beragama Islam dengan jumlah 4329 orang dengan persentase 79,39%, kemudian penduduk yang beragama Budha berjumlah 1114 orang dengan jumlah persentase 20,43%, dan jumlah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 10 orang dengan jumlah persentase 0,18%.

#### **4.5. Mata Pencarian**

Mata pencarian umumnya masyarakat Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6.**  
**Mata Pencarian Penduduk desa Teluk Pambang**

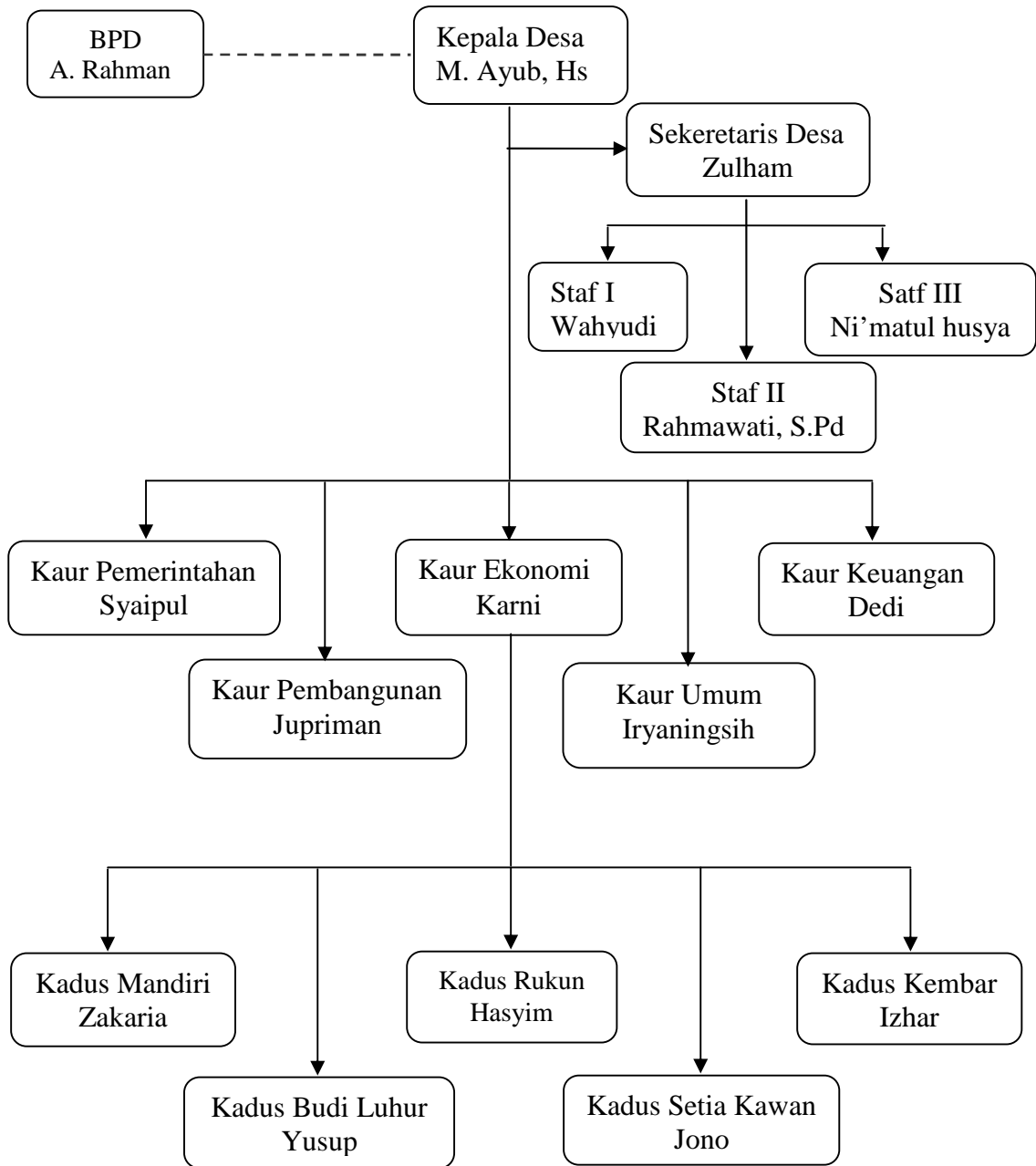
No	Mata Pencarian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	772	32,02
2	Buruh Swasta	285	11,82
3	Pegawai	106	4,40
4	Pengusaha	91	3,77
5	Peternak	84	3,48
6	Nelayan	554	22,98
7	Buruh/TKI	358	14,85
8	Pengrajin	152	6,30
9	Bidan dan Perawat	4	0,17
10	Montir	5	0,21
<b>Jumlah</b>		<b>2411</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011*



#### 4.6. Pemerintah Desa

Gambar 2. Bagan pemerintahan Desa Teluk Pambang Kecamatan Bamntan Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Pambang 2011

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat diuraikan kedudukan, tugas dan fungsi dari pemerintahan desa diatas sebagai berikut :

1. Kepala Desa (Kades)

- a. Kedudukan : Sebagai alat pemerintahan desa dan daerah
- b. Tugas : Menjalankan urusan rumah tangga organisasi, pemerintahan dan pembinaan masyarakat serta menumbuhkembangkan semangat jiwa gotong royong.
- c. Fungsi : Menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan diatasnya, menjaga keamanan dan ketertiban dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya

2. Sekretaris Desa (Sekdes)

- a. Kedudukan : Sebagai staf dibidang tata usaha desa dan pemimpin sekretaris desa
- b. Tugas : Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketatausahaan.
- c. Fungsi : Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan, melaksanakan tugas kepala desa dalam hal bila kepala desa berhalangan.

3. Kepala Urusan (KAUR)

- a. Kedudukan : Sebagai pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya masing-masing

b. Tugas : Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.

c. Fungsi : Melaksanakan administrasi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang menyangkut tugasnya masing-masing

#### 4. Kepala Dusun (Kadus)

a. Kedudukan : Sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa wilayah kerjanya

b. Tugas : Melaksanakan pemerintahan desa dibawah kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya.

c. Fungsi : Melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya, serta melaksanakan keputusan dan kebijakan kepala desa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang penyajian data yang diperoleh dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara penyebaran kuisioner kepada 94 responden, wawancara dan observasi langsung serta mengambil referensi dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini meliputi identitas responden, tanggapan responden dari masing-masing indikator dalam setiap sub variabel, dan rekapitulasi tanggapan responden dari setiap sub variabel. Untuk lebih jelasnya, hasil tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sebagai berikut :

#### 5.1. Identitas Responden

Berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan kepada masyarakat sebagai responden yang berada di Desa Teluk Pambang dapat diketahui gambaran dari keadaan responden sebagai berikut :

##### 5.1.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1.**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	65	69,15
2	Perempuan	29	30,85
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang jumlahnya paling banyak adalah responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 65 orang dengan persentase 69,15 %, sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan hanya berjumlah 29 orang dengan persentase 30,85 %.

Pada dasarnya KK merupakan Ayah/Bapak dari suatu rumah tangga, namun ada suatu keadaan yang mengharuskan kepala keluarga harus diwakilkan kepada seorang Istri/Ibu, bahkan kepala keluarga dapat digantikan oleh seorang Istri/Ibu. Keadaan seperti ini terjadi ketika seorang Ayah/Bapak tidak berada dirumah/desa sehingga harus diwakilkan dan seorang Ayah/bapak yang telah meninggal dunia maka seorang Istri/Ibu harus menggantikan dan bertindak sebagai kepala keluarga disuatu rumah tangga.

Keadaan seperti inilah yang terjadi saat penulis melakukan pengumpulan data penelitian. Pada saat penelitian tersebut, terdapat beberapa wanita yang bertindak sebagai kepala keluarga. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besara Ayah/Bapak bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia dan sebagian lagi telah meninggal dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepala keluarga harus menjadi TKI di negara lain yaitu :

a. Faktor Geografis

Wilayah tempat tinggal responden penelitian yaitu Desa Teluk Pambang letaknya berdekatan dengan Negara Malaysia karena hanya dipisahkan oleh selat malaka dan dapat ditempuh menggunakan kapal laut selama 3-4 jam. Karena faktor geografis inilah yang menyebabkan banyak kepala keluarga yang bekerja sebagai TKI di Negara Malaysia

b. Faktor Ekonomi

Masih banyak penduduk Desa Teluk Pambang yang perekonomiannya rendah, dan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu banyak penduduk Desa Teluk Pambang yang mengambil jalan pintas untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai TKI untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena pendapatan di Negara Malaysia lebih besar daripada pendapatan Desa Teluk Pambang.

5.1.2. Berdasarkan Tingkat Umur

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.2.**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	24 – 31 Tahun	26	27,66
2	32 – 39 Tahun	38	40,43
3	40 – 47 Tahun	19	20,21
4	48 – 55 Tahun	11	11,70
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat umur responden paling banyak adalah responden yang berumur 32 – 39 tahun yang berjumlah 38 orang dengan persentase 40,43 %, umur 24 – 31 berjumlah 26 orang dengan persentase 26,66 %, dengan dan umur 40 – 47 sebanyak 19 orang dengan persentase 20,21 % serta responden dengan jumlah paling sedikit yaitu responden yang berumur 48 – 55 tahun yang berjumlah 11 orang dengan persentase 11,70 %.

Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa responden yang terpilih adalah responden yang sudah cukup dewasa dan responden terbanyak adalah responden yang telah berumur 32 sampai dengan 39 tahun, dan diusia tersebutlah seseorang dapat dikatakan produktif dalam bertindak dan mengambil keputusan sehingga sebagian besar responden dalam penelitian ini telah banyak pengalaman untuk memberikan tanggapan-tanggapan kuisioner dari penelitian ini.

#### 5.1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam penelitian ini pendidikan sangat penting untuk menentukan kualitas responden. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.3.**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikannya**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	SD / Sederajat	20	21,27
2	SLTP / Sederajat	26	27,66
3	SLTA / Sederajat	31	32,98
4	D3	10	10,64
5	S1	7	7,45
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 94 responden memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Responden terbanyak memiliki latar belakang SLTA / sederajat sebanyak 31 KK dengan persentase 32,98. Sedangkan responden yang berjumlah sedikit memiliki belakang perguruan tinggi S1 dengan jumlah 7 KK dan persentase sebesar 7,45 %. Untuk responden yang memiliki latar belakang SD / sederajat, SLTP / Sederajat dan D3 memiliki

jumlah responden berturut-turut sebanyak 20 KK dengan persentase 21,27 % , 26 KK dengan persentase 27,66% dan 10 KK dengan persentase 10,64%.

Secara umum dilihat dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan responden dapat dikatakan baik, karena seluruh responden sudah mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar. Kemudian variasi tingkat pendidikan responden juga sudah cukup baik karna sudah mencakup tingkat SD , SLTP / Sederajat, SLTA / Sederajat, dan Perguruan tinggi. Karena semua responden rata-rata telah megenyam pendidikan maka dapat dikatakan sumber daya manusia di desa tersebut sudah baik. Hal tersebut dapat juga dilihat dari persentase terbesar pada tabel yaitu responden dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat dengan persentase sebesar 32,98%.

#### 5.1.4. Berdasarkan Mata Pencarian

Berikut ini adalah data responden dilihat berdasarkan dari mata pencarian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.4.**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencariannya**

No	Mata Pencarian	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Nelayan	28	29,79
2	Pedagang	15	15,96
3	Guru	14	14,89
4	Tani	13	13,83
5	Tidak bekerja	12	12,76
6	Buruh	10	10,64
7	Bidan	2	2,13
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencarian responden adalah nelayan yaitu sebesar 28 KK atau 29,79%, pedagang sebanyak 15 KK atau 15,96%, guru sebanyak 14 KK atau 14,89%, Tani sebanyak 13 KK atau 13,83%, tidak bekerja sebanyak 12 KK atau 12,76%, buruh sebanyak 10 KK atau 10,64% dan bidan sebanyak 2 KK atau 2,13%.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar mata pencarian responden adalah sebagai nelayan yaitu sebanyak 28 KK, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian bahwa nelayan adalah jenis mata pencarian utama masyarakat di Desa Teluk Pambang karena letak tersebut tepat berada ditepi selat malaka (laut). Oleh karena itu, penduduk Desa Teluk Pambang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia yaitu menjala/menjaring ikan, udang, kepiting dan hewan laut lainnya.

#### 5.1.5. Berdasarkan Suku Bangsa

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan suku bangsa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.5.**  
**Jumlah Responden Berdasarkan Suku Bangsa**

No	Suku Bangsa	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Jawa	37	39,36
2	Melayu	29	30,85
3	Asli	15	15,96
4	Tionghoa	13	13,83
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden adalah sebanyak 94 KK yang keseluruhannya terdiri dari suku jawa sebanyak 37 KK dengan persentase 39,36%, responden dengan suku bangsa melayu yang berjumlah 29 KK dengan persentase 30,85%, kemudian responden dengan suku bangsa asli (akit) sebanyak 15 KK dengan persentase sebesar 13,83% sedangkan responden dengan suku bangsa Cina memiliki jumlah sebanyak 13 KK dengan persentase sebesar 13,83%.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa suku yang paling dominan adalah suku jawa yaitu sebesar 37 KK, hal ini sesuai dengan observasi yang telah penulis lakukan dilokasi penelitian yaitu di Desa Teluk Pambang. Kemudian dilihat dari persentase tabel diatas, dapat dikatakan bahwa suku penduduk Desa Teluk Pambang hampir merata, dan itu berarti penduduk tersebut banyak yang berkompetisi untuk memperlihatkan keunggulan suku masing-masing dan dapat menimbulkan peselisihan bahkan jika seorang pemimpin tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik maka peselisihan akan tetap ada dan dapat menghambat pembangunan desa dan roda pemerintahan secara umumnya.

## **5.2. Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Sebagai mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dipedesaan. Pembangunan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu kepala desa yang memegang pimpinan tertinggi dan sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik serta memiliki kemampuan sesuai dengan peranannya sebagai kepala desa dan sebagai penggerak pembangunan di desanya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis keberhasilan pembangunan desa dilihat dari kemampuan kepala desa dalam menjalankan peranannya sebagai penggerak pembangunan di desa yang dipimpinnya.

Peran kepala desa sebagai penggerak pembangunan di Desa Teluk Pambang adalah :

### **5.2.1. Kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan**

Membuat perencanaan pembangunan disini memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya kepala desa melakukan perencanaan terlebih dahulu agar dalam pelaksanaannya terstruktur sehingga hal tersebut memperbesar peluang tercapainya tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini meliputi musyawarah, pemberian tujuan, dan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan serta saran, ide-ide dan tanggapan masyarakat dirumuskan dalam perencanaan pembangunan fisik desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kemampuan kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.6.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Membuat Perencanaan Pembangunan Dalam hal Memberikan Tujuan Dari Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	9,57
2	Baik	46	48,94
3	Tidak Baik	39	41,49
4	Sangat Tidak Baik	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala desa sudah baik dalam memberikan tujuan dari pelaksanaan pembangunan dimana dari 94 responden lebih dari setengah menjawab baik dan sangat baik yaitu 9 KK menjawab sangat baik dengan persentase sebesar 9,57% dan 46 KK menjawab baik dengan persentase sebesar 48,94%, sedangkan responden dengan jumlah 39 KK menjawab tidak baik dengan persentase sebesar 41,49%.

Jadi, dari tabel diatas responden dominan menjawab baik yaitu sebanyak 46 responden, hal tersebut terjadi karena hasil wawancara dengan aparat desa(jupriman) pada tanggal 3 juni 2012 mengatakan :

*“kepala desa sering membuat tujuan dilakukannya pembangunan sebelum pelaksanaanya lebih lanjut, namun terkadang kepala desa juga lupa dalam mengatakantujuan melainkan langsung ke manfaatnya”*

Dari jawaban kaur pembangunan diatas jelaslah bahwa kepala desa sudah menjalankan peran membuat tujuan pembangunannya dengan baik.

Kemudian kemampuan kepala desa dalam memberikan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan fisik desa dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab sangat baik sebanyak 9 KK atau 9,57%, 49 KK atau 52,13% yang menjawab baik, 34 KK atau 36,17% yang menjawab tidak baik dan 2 KK atau 2,13% yang menjawab sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.7.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Membuat Perencanaan Pembangunan Dalam hal Memberikan Langkah-Langkah Dari Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	9,57
2	Baik	49	52,13
3	Tidak Baik	34	36,17
4	Sangat Tidak Baik	2	2,13
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa sering memberikan langkah-langkah pada saat perencanaan pembangunan, buktinya dilihat dari jumlah responden yang terbanyak (49 KK) mengatakan peran kepala desa sudah baik dalam memberikan langkah-langkah pelaksanaan pembangunan.

Dari kegiatan penelitian hasil penelitian menggunakan metode angket, ternyata tanggapan dan jawaban responden tentang kepala desa dalam melakukan musyawarah pada saat merumuskan perencanaan pembangunan di desanya, dimana 8 KK atau 8,51% dari 94 KK menyatakan sangat baik, 53 KK atau 56,38% menyatakan baik, 30 KK atau 31,92% menyatakan tidak baik dan

sebanyak 3 KK atau 3,19% menyatakan sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.8.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Membuat Perencanaan Pembangunan Dalam Hal Melakukan Musyawarah Untuk Merumuskan Perencanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	8	8,51
2	Baik	53	56,38
3	Tidak Baik	30	31,92
4	Sangat Tidak Baik	3	3,19
<b>JUMLAH</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari hasil wawancara kepada kepala desa (M. Ayup, HS)teluk pambang pada tanggal 25 juni 2012 mengatakan :

*“ Pada saat perencanaan ini saya terlebih dahulu melakukan musyawarah kemudian juga tujuan dilakukannya pembangunan, setelah itu barulah saya melibatkan masyarakat, tapi saya terkadang langsung berbicara dengan kaur pembangunan tentang pembangunan tanpa harus melakukan musyawarah, karewna musyawarah menurut saya di desa ini sangat ribet”*

Melakukan musyawarah pada saat perencanaan pembangunan adalah hal yang harus dilakukan serta merupakan hal yang harus dikerjakan bersama seluruh warga. Jadi, berdasarkan persentase responden yang lebih banyak mengatakan baik, maka dapat pula dikatakan bahwa kepala desa baik dalam menjalankan perannya untuk melakukan musyawarah pada perencanaan pembangunan di Desa Teluk Pambang. Kemudian dalam hal kepala desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merumuskan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.9.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala**  
**Desa Membuat Perencanaan Pembangunan Dalam hal Melibatkan**  
**Masyarakat Pada Saat Musyawarah**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	11	11,70
2	Baik	35	37,23
3	Tidak Baik	41	43,62
4	Sangat Tidak Baik	7	7,45
<b>JUMLAH</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran pemimpin dalam melibatkan masyarakat dalam musyawarah dapat dikatakan tidak baik, karena jika dilihat dari hasil penelitian banyak responden yang mengatakan bahwa kepala desa kurang tegas dalam melibatkan masyarakat pada saat musyawarah. Oleh sebab itulah kepala desa dikatakan tidak baik dalam menjalankan peranannya untuk melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan jumlah responden yang mengatakan tidak baik sebanyak 41 KK atau 43,62 %, yang mengatakan sangat tidak baik sebanyak 7 KK atau 7,45%, sedangkan yang mengatakan baik hanya 35 KK atau 37,23% dan yang mengatakan sangat baik sebanyak 11 KK atau 11,70%.

Kemudian untuk peran kepala desa dalam menanggapi saran dan usulan dari masyarakat pada saat musyawarah dapat dikatakan baik jika dilihat dari 47 KK yang mengatakan peran kepala desa tersebut baik dengan persentase 50%, kemudian 4 KK menyatakan sangat baik dengan persentase 4,26%, sedangkan responden yang menyatakan peran kepala desa tersebut tidak baik sebanyak 37 KK atau 39,36%, serta 6 KK atau 6,38% menyatakan sangat tidak baik. Dan

itu berarti bahwa kepala desa lebih sering menerima usulan dan menanggapi saran dari masyarakat pada saat musyawarah untuk perencanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.10.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Kemampuan Kepala Desa Membuat Perencanaan Pembangunan Dalam Hal Menanggapi Saran dan Usulan Masyarakat Pada Saat Musyawarah**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	4,26
2	Baik	47	50
3	Tidak Baik	37	39,36
4	Sangat Tidak Baik	6	6,38
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

#### 5.2.2. Kemampuan Kepala Desa Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, seorang pemimpin memiliki peran sebagai administrator pembangunan dalam memberikan pengarahan kepada bawahan agar tercapainya suatu pembangunan. Peran pemimpin dalam memberikan pengarahan yang pertama adalah mengikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Dalam peran ini tanggapan responden sebanyak 10 KK atau 10,64% menjawab sangat baik, 28 KK atau 29,79% menjawab Baik, 41 KK atau 43,61% menjawab tidak baik, dan sebanyak 15 KK atau 15,96% menjawab sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 5.11.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala**  
**Desa Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Hal**  
**Mengikutsertakan Masyarakat Untuk Berpartisipasi**  
**Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	10,64
2	Baik	20	29,79
3	Tidak baik	41	43,61
4	Sangat Tidak Baik	15	15,96
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Jika kita lihat pada tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemimpin kurang bisa mengikutkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bahkan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terjadi karena menurut ketua BPD (A. Rahman) pada tanggal 25 juni 2012 mengatakan:

*“ Kepala desa sendiri kurang berpartisipasi dan bahkan kepala desa tidak ikut berpartisipasi, makanya kepala desa dikatakan kurang baik dalam menjalankan peran nya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Itu artinya kepala desa kurang terlihat pada saat pelaksanaan pembangunan”*

Sedangkan peran pemimpin dalam mengendalikan aparat dan masyarakat desa dalam pelaksanaanpembangunan menurut responden dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam hal mengendalikan masyarakat dan aparat desa pada saat pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden yang mengatakan peran kepala desa baik sebanyak 45 KK atau 47,87%, 12 KK atau 12,77% mengatakan sangat baik, dan 37 KK atau 39,36% menyatakan tidak baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.12.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala**  
**Desa Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Hal**  
**mengendalikan Aparat dan Masyarakat Desa Pada**  
**Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	12,77
2	Baik	45	47,87
3	Tidak Baik	37	39,36
4	Sangat Tidak Baik	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Untuk peran kepala desa dalam memberikan arahan-arahan kepada aparat dan masyarakat desa dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

Wawancara penulis dengan sekretaris desa (Zulham) Desa Teluk Pambang pada tanggal 25 juni 2012 mengatakan :

*“ Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, kepala desa tidak memberikan pengarahan yang akan dilakukan dulu oleh masyarakat, melainkan langsung kepelaksanaannya. Selama setahun belakangan ini kepala desa memberikan pengarahan hanya sekali dua kali saja, itupun hanya pengarahan pelaksanaannya, untuk pengarahan alat-alat yang digunakan tidak dijelaskan oleh beliau”*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.13.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala**  
**Desa Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Hal**  
**Memberikan Pengarahan Kepada Aparat dan Masyarakat Desa**  
**Pada Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	15	15,96
2	Baik	50	53,19
3	Tidak Baik	24	25,53
4	Sangat Tidak Baik	5	5,32
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat di ketahui tanggapan responden mengenai peran kepala desa dalam memberikan arahan kepada aparat dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan bahwa kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dilihat dari tindakan kepala desa pada saat pelaksanaan pembangunan, kepala desa lebih sering memberikan arahan-arahan bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu peran kepala desa dalam memberikan arahan-arahan kepada aparat dan masyarakat desa pada saat pelaksanaan pembangunan termasuk dalam kategori baik, sebanyak 50 KK atau 53,19% menyatakan baik, tanggapan responden dengan 24 KK atau 25,53% menyatakan tidak baik, sedangkan yang menyatakan sangat baik sebanyak 15 KK atau 15,96%, serta tanggapan responden dengan 5 KK atau 5,32% menyatakan sangat tidak baik.

Dari kegiatan penelitian lapangan menggunakan metode angket, ternyata tanggapan responden tentang peran kepala desa dalam membentuk kelompok-kelompok dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebanyak 6 KK

atau 6,38% menjawab sangat baik, 34 KK atau 36,17% menjawab baik, 45 KK 47,87% menjawab tidak baik, dan 9 KK atau 9,58% menjawab sangat tidak baik, sama halnya dengan hasil wawancara yang dikatakan oleh sekretaris desa (Zulham) pada juli 2012 :

*Kepala desa jarang membagi kelompok-kelompok kecil dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa lebih sering membiarkan masyarakatnya untuk membagi-bagi kelompok sendiri menurut kemampuannya masing-masing.*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.14.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Hal Membentuk Kelompok-kelompok Pada Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	6,38
2	Baik	34	36,17
3	Tidak Baik	45	47,87
4	Sangat Tidak Baik	9	9,58
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden apakah responden telah ikut berpartisipasi atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.15.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan Dalam Hal Apakah Responden Telah Ikut Berpartisipasi Pada Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	9,57
2	Baik	19	20,21
3	Tidak Baik	51	54,26
4	Sangat Tidak Baik	15	15,96
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat tidak banyak yang ikut berpartisipasi, karena responden terbanyak menjawab tidak baik (kadang-kadang ikut berpartisipasi) sebanyak 51 KK Atau 54,26%, sedangkan yang menjawab baik (sering) Sebanyak 19 KK Atau 20,21% dan 15KK atau 15,96% menjawab sangat tidak baik (tidak pernah) serta 9 KK atau 9,57% menjawab sangat Baik (selalu).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat banyak sekali yang tidak ikut berpartisipasi, hal ini terjadi karena peran kepala desa dalam mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi juga tidak baik sehingga masyarakat juga banyak yang tidak termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini sama dengan hasil wawancara yang dilakukan pada kaur pembangunan (jupriman) pada tanggal 25 juni 2012 yang mengatakan bahwa :

*“ Kepala desa saja tidak bergerak, gimana dengan masyarakatnya, pasti juga tidak ikut bergerak, sama halnya dengan pepatah tidak akan ada asap kalau tidak ada api”*

### 5.2.3. Peran Kepala Desa Dalam Mengambil Keputusan Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan

Peran kepala desa dalam mengambil keputusan dapat diartikan bahwasanya selaku pemimpin yang baik sebelum mengambil keputusan pada proses penyelenggaraan pembangunan sebaiknya melakukan musyawarah bersama-sama dengan aparat dan masyarakat desa serta membentuk kelompok-kelompok dan memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai peran kepala desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.16.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai peran Kepala Desa Mengambil Keputusan Dalam Hal Mengadakan Musyawarah Dari Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	16	17,02
2	Baik	40	42,55
3	Tidak Baik	26	27,66
4	Sangat Tidak Baik	12	12,77
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala desa sudah baik dalam mengadakan musyawarah dari pelaksanaan pembangunan karena kepala desa lebih sering melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan dibandingkan dengan mengambil keputusan tanpa musyawarah. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa tanggapan responden, dimana dari 94 responden lebih dari setengah menjawab baik dan sangat baik yaitu 16 KK menjawab sangat baik dengan persentase sebesar 17,02% dan 40 KK menjawab baik dengan persentase sebesar 42,55%, sedangkan responden dengan jumlah 26 KK menjawab tidak baik dengan persentase sebesar 27,66%, serta 12 KK atau 12,77% menyatakan sangat tidak baik.

Selain itu, hal ini juga dikuatkan dengan pendapat wakil ketua BPD (26 juni 2012) yang mengatakan bahwa :

*“Kepala desa sering melakukan musyawarah dengan aparat desa serta masyarakat sekitar, tapi kalau pembangunan itu harus cepat dilakukan, dan*

waktunya mepet, kepala desa langsung ambil keputusan untuk melakukan pembangunan”.

Kemudian peran kepala desa dalam meminta saran dan usulan kepada masyarakat dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab sangat baik sebanyak 5 KK atau 5,327%, 27 KK atau 28,72% yang menjawab baik, 48 KK atau 51,07% yang menjawab tidak baik dan 14 KK atau 14,89% yang menjawab sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.17.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Kemampuan Kepala Desa Mengambil Keputusan Dalam hal Meminta Saran dan Usulan Kepada Masyarakat dari Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	5,32
2	Baik	27	28,72
3	Tidak Baik	48	51,07
4	Sangat Tidak Baik	14	14,89
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa tidak baik dalam hal meminta saran dan usulan kepada masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, dimana dari 94 responden sebanyak 48 KK yang menjawab tidak baik. Padahal dari hasil wawancara kepada salah satu aparat desa (26 juni 2012) mengatakan bahwa :

*“Kepala desa sering meminta saran dan usulan dari masyarakat, namun warga masyarakat desa tetap banyak yang mengatakan kepala desa tidak meminta saran dan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena saran dan usulan dari masyarakat jarang sekali diterima oleh kepala desa”.*

Dari kegiatan penelitian lapangan menggunakan metode angket, ternyata tanggapan dan jawaban responden tentang kepala desa dalam memberikan

alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi pada saat pengambilan keputusan sejalan dengan hasil wawancara penulis kepada sekretaris desa pada tanggal 26 juni 2012 yang mengatakan:

*Kepala desa hampir tidak pernah membuat cadangan cara-cara/antisipasi dari kegagalan pembangunan itu, habis musyawarah langsung dikerjakan pembangunan itu.*

Selanjutnya dengan jawaban responden dimana 8 KK atau 8,51% dari 94 KK menyatakan sangat baik, 22 KK atau 23,41% menyatakan baik, 45 KK atau 47,87% menyatakan tidak baik dan sebanyak 19 KK atau 20,21% menyatakan sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.18.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengambil Keputusan Dalam Hal Memberikan Alternatif-Alternatif Dari Kemungkinan yang Terjadi**

No	Jawaban Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	8	5,32
2	Baik	22	28,72
3	Tidak Baik	45	47,87
4	Sangat Tidak Baik	19	20,21
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa dikatakan tidak baik dalam memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi. Kemudian dalam hal kepala desa mengambil keputusan berdasarkan saran dan usulan dari masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 5.19.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala**  
**Desa Mengambil Keputusan Dalam Hal Pengambilan Keputusan**  
**Berdasarkan Saran dan Usulan Dari Masyarakat**

No	Jawaban Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	5	5,32
2	Baik	31	32,98
3	Tidak Baik	47	50
4	Sangat Tidak Baik	11	11,70
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran pemimpin dalam mengambil keputusan berdasarkan saran dan usulan dari masyarakat dapat dikatakan tidak baik. Hal ini berhubungan erat dengan pendapat salah satu aparat desa (jupriman) beserta salah satu masyarakat yang dijadikan responden pada tanggal 27 juni 2012 yang mengatakan bahwa :

*“Pada saat musyawarah kepala desa meminta saran dan usulan dari masyarakat namun jarang sekali menerima saran dan usulan tersebut, dan itu berarti keputusan yang diambil jarang sekali berdasarkan atas usulan dan saran dari masyarakat”.*

Hal ini juga sesuai dengan jumlah responden yang mengatakan tidak baik sebanyak 47 KK atau 50 %, yang mengatakan sangat tidak baik sebanyak 11 KK atau 11,70%, sedangkan yang mengatakan baik hanya 31 KK atau 32,98% dan yang mengatakan sangat baik sebanyak 5 KK atau 5,32%.

Kemudian untuk peran kepala desa dalam ketegasan kepala desa dengan keputusan yang diambilnya dapat dikatakan tidak baik jika dilihat dari

hasil wawancara kepada kaur pembangunan (jupriman) pada tanggal 25 juni 2012 yang mengatakan bahwa :

*“Dalam kesehariannya saat melakukan musyawarah pembangunan. Kepala desa kurang memiliki ketegasan dengan keputusan yang diambilnya. Misalnya, dalam menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan namun setelah ditetapkan kepala desa sering kali merubah keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya”.*

Ini lah hal yang menjadi sebab/faktor mesyarakat dan aparat desa kurang antusias atau kurang bersemangat dalam proses pembangunan. Hal ini diperkuat oleh beberapa tanggapan responden, dimana 55 KK yang mengatakan peran kepala desa tersebut tidak baik dengan persentase 58,51%, kemudian 7 KK menyatakan sangat tidak baik dengan persentase 7,45%, sedangkan responden yang menyatakan peran kepala desa tersebut baik sebanyak 16 KK atau 17,02%, serta 16 KK atau 17,02% menyatakan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.20.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengambil Keputusan Dalam Hal Ketegasan Kepala Desa Dengan Keputusan yang Diambilnya**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	16	17,02
2	Baik	16	17,02
3	Tidak Baik	55	58,51
4	Sangat Tidak Baik	7	7,45
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

#### 5.2.4. Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan, seorang pemimpin memiliki peran sebagai administrator pembangunan dalam mengkoordinir penyelenggaraan

pembangunan fisik desa untuk tercapainya suatu pembangunan. Peran pemimpin dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan yang pertama adalah melakukan pembagian tugas pada aparat desa. Dalam peran ini tanggapan responden sebanyak 17 KK atau 18,09% menjawab sangat baik, 27 KK atau 28,72% menjawab Baik, 36 KK atau 38,30% menjawab tidak baik, dan sebanyak 14 KK atau 14,89% menjawab sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat padatable berikut :

**Tabel 5.21.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala**  
**Desa Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal**  
**Pembagian Tugas Pada Aparat Desa**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	17	18,09
2	Baik	27	28,72
3	Tidak baik	36	38,30
4	Sangat Tidak Baik	14	14,89
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Jika kita lihat dari data hasil wawancara kaur pembangunan (jupriman) pada tanggal 25 juni 2012 dan observasi langsung kelokasi maka dapat dikatakan bahwa :

*Peran pemimpin dalam melakukan pembagian tugas kepada aparat dan masyarakat desa jarang sekali dilakukan, kepala desa lebih sering membiarkan aparat dan masyarakat desa tersebut untuk membagi tugas sesamanya menurut bidang dan keahliannya masing-masing.*

Tindakan kepala desa seperti inilah yang membuat masyarakat Desa Teluk Pambang mengatakan peran kepala desaini kurang baik. Sama halnya dengan peran pemimpin dalam melakukan pembagian tugas kepada masyarakat desa juga dikatakan tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden yang mengatakan peran kepala desa tidak baik sebanyak

60 KK atau 63,83%, 17 KK atau 18,08% mengatakan sangat tidak baik, dan 13 KK atau 13,83% menyatakan baik serta 4 KK atau 4,26 menyatakan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.22.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Melakukan Pembagian Tugas Kepada Masyarakat Desa**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	4,26
2	Baik	13	13,83
3	Tidak Baik	60	63,83
4	Sangat Tidak Baik	17	18,08
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Untuk peran kepala desa dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.23.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Pelaksanaan Tugas Dari Kepala Desa**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	6	6,39
2	Baik	37	39,36
3	Tidak Baik	40	42,55
4	Sangat Tidak Baik	11	11,70
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat di ketahui tanggapan responden mengenai peran kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dalam hal pelaksanaan tugas dari kepala desa termasuk dalam kategori tidak baik, karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan itu berasal dari peran kepala desa yang kurang baik dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Hal ini juga dapat dilihat dari tanggapan responden dimana sebanyak 40 KK atau 42,55% menyatakan tidak baik, tanggapan responden dengan 37 KK atau 39,36% menyatakan baik, sedangkan yang menyatakan sangat baik sebanyak 6 KK atau 6,39%, serta tanggapan responden dengan 11 KK atau 11,70% menyatakan sangat tidak baik.

Dari kegiatan penelitian menggunakan metode angket, ternyata tanggapan responden tentang peran kepala desa dalam kesadarannya untuk terjun membantu pelaksanaan pembangunan adalah sebanyak 2 KK atau 2,13% menjawab sangat baik, 13 KK atau 13,83% menjawab baik, 58 KK 61,70% menjawab tidak baik, dan 21 KK atau 22,34% menjawab sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.24.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengkordinir Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Apakah Kepala Desa Terjun Membantu Pelaksanaan Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	2	2,13
2	Baik	13	13,83
3	Tidak Baik	58	61,70
4	Sangat Tidak Baik	21	22,34
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam kesadarannya untuk ikut terjun membantu pelaksanaan pembangunandinyatakan tidak baik, hal ini didukung dengan hasil wawancara

terhadap wakil BPD dan beberapa warga pada tanggal 25 juli 2012 yang mengatakan bahwa :

*Kepala desa jarang berkunjung ketempat pembangunan dilaksanakan dan tidak banyak terjun membantu, kepala desa datang hanya memeriksa keadaan.*

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden apakah kepala desa memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.25.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Diberikan Kepala Desa**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	10	10,64
2	Baik	37	39,36
3	Tidak Baik	34	36,17
4	Sangat Tidak Baik	13	13,83
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa belum dapat dikatakan sempurna dan baik dalam hal memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 34 KK Atau 36,17%, sedangkan yang menjawab baik sebanyak 37 KK Atau 39,36% dan 13 KK atau 13,83% menjawab sangat tidak baik serta 10 KK atau 10,64% menjawab sangat Baik. Hal ini juga dapat dikatakan pemberian fasilitas sarana dan sarana pembangunan oleh kepala desa adalah seimbang, kadang kepala desa memfasilitasi dan terkadang juga tidak.

Jika dilihat dari hasil wawancara kepada kepala desa (M. Ayup, HS) pada tanggal 27 juli 2012, mengatakan bahwa :

*“Saya berikan sarana dan sarana untuk melakukan pembangunan-pembangunan didesa, tapi jika dana tersedia, jika tidak maka saya mencari solusi lain agar pembangunan bisa diselesaikan. Tapi biasanya jika terkendala itu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan dana”.*

#### 5.2.5. Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Aktifitas-aktifitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan

Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan dapat diartikan sebagai tindakan kepala desa untuk mengawasi segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan. Oleh karena itu diharapkan kepala desa untuk menjalankan tugas yang seharusnya harus dilaksanakan yaitu dengan mendatangi lokasi pembangunan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan tersebut terjadi penyimpangan atau kendala, serta memeriksa tingkat kelayakan materi bangunan. Hal tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar pembangunan yang dilaksanakan tercapai dengan sempurna.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai peran kepala desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan dalam hal mendatangi lokasi pembangunanDesa Teluk Pambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.26.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengawasi Aktivitas-Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Mendatangi Lokasi Pembangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	7	7,45
2	Baik	15	15,96
3	Tidak Baik	42	44,68
4	Sangat Tidak Baik	30	31,91
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala desa kurang berperan dengan baik dalam mendatangi lokasi pembangunansama halnya dengan hasil wawancara terhadap sekretaris desa (Zulham) pada tanggal 26 juli 2012 yang mengatakan bahwa :

*Kepala desa jarang sekali mengunjungi lokasi pembangunan dan bahkan kepala desa tidak pernah mengunjungi lokasi. Kepala desa lebih sering menanyakan keadaan pembangunan kepada kaur pembangunan dan aparat desa lainnya.*

Jawaban responden juga mendukung keadaan tersebut dimana dari 94 responden lebih dari setengah menjawab tidak baik dan sangat tidak baik yaitu 30 KK menjawab sangat tidak baik dengan persentase sebesar 31,91% dan 42 KK menjawab tidak baik dengan persentase sebesar 44,68%, sedangkan responden dengan jumlah 15 KK menjawab baik dengan persentase sebesar 15,96% serta 7 KK dengan persentase sebesar 7,45% menjawab sangat tidak baik.



Kemudian tanggapan responden tentang apakah dalam pelaksanaan pembangunan terjadi penyimpangan adalah sebanyak 12 KK atau 12,77% mengatakan sangat baik, 20 KK atau 21,28% yang menjawab baik, 37 KK atau 39,36% yang menjawab tidak baik dan 25 KK atau 26,59% yang menjawab sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.27.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengawasi Aktivitas-Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Apakah Pernah Terjadi Penyimpangan/ Kendala Dalam Pelaksanaan pembangunan**

No	Jawaban Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	12,77
2	Baik	20	21,28
3	Tidak Baik	37	39,36
4	Sangat Tidak Baik	25	26,59
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sering terjadi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan, misalnya penyelewengan dana dan bahan, pengurangan materi, pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal, dan penyimpangan lainnya. Sedangkan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan misalnya kendala pada materi bangunan contohnya adalah kekurangan semen ataupun kekurangan pasir. Hal ini juga dapat dilihat dari tanggapan responden dimana dari 94 responden sebanyak 62 KK yang menjawab tidak baik dan sangat tidak baik.

Dari kegiatan penelitian lapangan menggunakan metode angket, ternyata tanggapan dan jawaban responden tentang kepala desa dalam memberikan jalan keluar dari kendala atau penyimpangan pada saat

pelaksanaan pembangunan di desanya, dimana 13 KK atau 13,84% dari 94 KK menyatakan sangat baik, 27 KK atau 28,72% menyatakan baik, 27 KK atau 28,72% menyatakan tidak baik dan sebanyak 27 KK atau 28,72% menyatakan sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.28.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengawasi Aktivitas-Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Memberikan Jalan Keluar Terhadap Penyimpangan/Kendala**

No	Jawaban Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	13	13,84
2	Baik	27	28,72
3	Tidak Baik	27	28,72
4	Sangat Tidak Baik	27	28,72
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepala desa kurang baik dalam memberikan jalan keluar terhadap penyimpangan/kendala pembangunana di Desa Teluk Pambang.

Menurut kepala desa (M. Ayub, Hs) pada tanggal 27 juli 2012, dia mengatakan bahwa:

*“Saya hanya menegur atau memberikan peringatan saja tetapi tidak memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penyimpangan tersebut, saya segan kepada warga-warga tersebut, karena warga yang melakukan penyimpangann tersebut adlah warga dengan umur yang cukup tua”.*

Begitu pula dengan hasil wawancara penulis kepada seorang warga (yasin) yang termasuk kedalam aparat desa :

*“Ketika terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa tidak langsung bertindak mencari solusi/ jalan keluar tersebut, melainkan menunda-nunda yang akhirnya pembangunan akan terbengkalai”.*

Kemudian dalam hal kepala desa memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penyimpangan/kendala dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.29.**

**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengawasi Aktivitas-Aktivitas Dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan Dalam Hal Memberikan Sanksi Kepada Orang Yang Melakukan Penyimpangan/Kendala**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	15	15,96
2	Baik	13	13,84
3	Tidak Baik	38	40,42
4	Sangat Tidak Baik	28	29,78
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dapat dikatakan bahwa peran pemimpin dalam memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penyimpangan/kendala pada pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan tidak baik. Hal ini sesuai dengan jumlah responden yang mengatakan tidak baik sebanyak 38 KK atau 40,42 %, yang mengatakan sangat tidak baik sebanyak 28 KK atau 29,78%, sedangkan yang mengatakan baik hanya 13 KK atau 13,84% dan yang mengatakan sangat baik sebanyak 15 KK atau 15,96%.

Kemudian untuk peran kepala desa dalam hal memeriksa kelayakan materi bangunan juga dapat dikatakan tidak baik, pernyataan ini dapat disimpulkan oleh beberapa tanggapan responden dan juga berdasarkan informasi yang diberikan oleh ketua BPD (A. Rahman) pada tanggal 25 juli 2012 :

*Karena kepala desa jarang mendatangi lokasi pembangunan dan secara tidak langsung kepala desa tidak memeriksa kelayakan materi, kepala desa telah memberikan tugas kepada salah satu aparat desa untuk memeriksa peralatan tersebut.*

Jika dilihat dari 36 KK yang mengatakan peran kepala desa tersebut tidak baik dengan persentase 38,30%, kemudian 35 KK menyatakan sangat tidak baik dengan persentase 37,23%, sedangkan responden yang menyatakan peran kepala desa tersebut baik sebanyak 14 KK atau 14,89%, serta 9 KK atau 9,58% menyatakan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.30.**  
**Tanggapan Responden Desa Teluk Pambang Mengenai Peran Kepala Desa Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan dalam hal memeriksa kelayakan materi bangunan**

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (KK)	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	9,58
2	Baik	14	14,89
3	Tidak Baik	36	38,30
4	Sangat Tidak Baik	35	37,23
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

### **5.3. Rekapitulasi Tanggapan Responden dalam Setiap Sub Variabel Penelitian**

Untuk mengetahui keseluruhan dari 5 sub variabel pada variabel peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Maka disajikan rekapitulasi masing-masing dari sub variabel penelitian sebagai berikut ini :

#### **5.3.1. Peran Membuat Perencanaan Pembangunan**

Seorang pemimpin dapat dikatakan memiliki peran membuat perencanaan pembangunan dengan baik jika kepala desa telah membuat tujuan pembangunan, langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, melakukan musyawarah, melibatkan masyarakat dalam musyawarah serta menanggapi saran dan usulan dari masyarakat desa.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepala desa sudah melaksanakan hal yang seharusnya dilakukan dalam merencanakan pembangunan, namun kepala desa tidak selalu melakukannya dalam setiap perencanaan pembangunan.

Dari hasil wawancara ketua BPD (A. Rahman) Desa Teluk Pambang pada tanggal 25-26 juli 2012, mengatakan bahwa :

*“Kepala desa memang lebih sering melakukan musyawarah dan menjelaskan tujuan serta langkah-langkah dari pelaksanaan pembangunan, tetapi jarang melibatkan masyarakat dan menerima saran serta usulan dari masyarakat pada saat musyawarah. Seharusnya kepala desa melibatkan masyarakat dan menerima usulan dari masyarakat karna pembangunan yang akan dilaksanakan adalah milik bersama”*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.31.**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa**  
**Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa dalam Membuat**  
**Perencanaan Pembangunan**

No	Indikator	Tanggapan Responden			
		Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1	Memberikan tujuan	9 (9,57%)	46 (48,94%)	39 (41,49%)	0 (0 %)
2	Membuat langkah-langkah	9 (9,57%)	49 (52,13%)	34 (36,17%)	2 (2,13%)
3	Melakukan Musyawarah	8 (8,51%)	53 (56,38%)	30 (31,92%)	3 (3,19%)
4	Melibatkan masyarakat dalam musyawarah	11 (11,70%)	35 (37,23%)	41 (43,62%)	7 (7,45%)
5	Menanggapi saran/usulan masyarakat	4 (4,26%)	47 (50,00%)	37 (39,36%)	6 (6,38%)
<b>Persentase</b>		<b>43,61%</b>	<b>244,68</b>	<b>192,56%</b>	<b>19,15%</b>
<b>Skor</b>		<b>41 x 4</b>	<b>230 x 3</b>	<b>181 x 2</b>	<b>18 x 1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>164</b>	<b>690</b>	<b>362</b>	<b>18</b>

Sumber : data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab baik ada 41 KK dengan persentase sebesar 43,61 %, yang menjawab

baik sebanyak 230 KK dengan persentase 244,68 %, yang menjawab tidak baik sebanyak 181 KK dengan persentase 192,56 % dan yang menjawab sangat tidak baik sebanyak 18 KK dengan persentase 19,15 %.

Kemudian berdasarkan dari penjumlahan dan perkalian skor dari 5 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa peran kepala desa sebagai administrator dalam perencanaan pembangunan fisik desa mendapat perolehan skor 1284, dan dinyatakan dalam kategori **Tidak Baik**.

#### 5.3.2. Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan dalam Pelaksanakan Pembangunan

Peran dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan yang baik adalah ketika seorang pemimpin mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mengendalikan aparat dan masyarakat, memberikan arahan kepada bawahan dan membentuk kelompok-kelompok serta partisipasi yang diberikan oleh masyarakat.

Menurut hasil wawancara kepada kaur pembangunan (jupriman) pada tanggal 26 juli bahwasanya :

*Kepala desa sudah melakukan peran tersebut keseluruhan, namun tidak selalu dilakukan melainkan terkadang dilakukan terkadang juga tidak dilakukan. Kepala desa mengira dan beranggapan bahwa masyarakat desa dapat menyesuaikan diri masing-masing dalam pelaksanaan pembangunan .*

Halini lah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa peran kepala desa dalam hal memberikan arahan kepada penduduk Desa Teluk Pambang tersebut kurang baik untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.32.**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa**  
**Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa dalam Memberikan**  
**Pengarahan Kepada Bawahan dalam Pelaksanaan Pembangunan**

No	Indikator	Tanggapan Responden			
		Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1	Mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi	10 (10,64%)	20 (29,79%)	41 (43,61%)	15 (15,96%)
2	Mengendalikan aparat dan masyarakat desa	12 (12,77%)	45 (47,87%)	37 (39,36%)	0 (0%)
3	Memberikan arahan kepada aparat dan masyarakat desa	15 (15,96%)	50 (53,19%)	24 (25,53%)	5 (5,32)
4	Membentuk kelompok-kelompok kerja	6 (6,38%)	34 (36,17)	45 (47,87%)	9 (9,58)
5	Partisipasi dari masyarakat	9 (9,57%)	19 (20,21)	51 (54,26%)	15 (15,96)
<b>Persentase</b>		<b>55,32%</b>	<b>187,23</b>	<b>210,63</b>	<b>46,82</b>
<b>Skor</b>		<b>52 x 4</b>	<b>176 x 3</b>	<b>198 x 2</b>	<b>44 x 1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>208</b>	<b>528</b>	<b>396</b>	<b>44</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti dari subvariabel memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, tanggapan responden yang menyatakan sangat baik totalnya adalah 52 x 4 jumlahnya 208, yang menyatakan baik totalnya adalah 176 x 3 jumlahnya 528, kemudian yang menyatakan tidak baik totalnya 198 x 2 jumlahnya 396, dan yang menyatakan sangat tidak baik totalnya 44 x 1 dengan jumlah 44.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 5 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan

pembangunan didesa teluk pambang mendapat perolehan skor 1176, dan dinyatakan dalam kategori **Tidak Baik**.

### 5.3.3. Mengambil Keputusan dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan

Peran kepala desa dalam mengambil keputusan dapat dikatakan baik ketika kepala desa telah melakukan musyawarah, meminta saran dan usulan dari masyarakat, memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi, keputusan yang diambil berdasarkan saran dan usulan dari masyarakat, dan tegas terhadap keputusan yang telah diambil.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa (M. Ayub, Hs) 26 juli 2012, kepala desa mengatakan bahwa :

*Saya telah melakukan musyawarah, meminta saran dan memberikan alternatif dalam mengambil kesimpulan atau keputusan.*

Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil wawancara terhadap ketua dan wakil BPD yang mengatakan bahwa :

*Kepala desa memang mengadakan musyawarah dan meminta saran sekaligus memberikan alternatif dalam pelaksanaan musyawarah, namun kepala desa sering mengabaikan saran-saran dari masyarakat pada saat mengambil kesimpulannya dan jarang sekali memberikan alternatif-alternatif pada saat pengambilan keputusan.*

Mungkin hal ini lah yang membuat masyarakat mengatakan peran kepala desa kurang baik dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini jawaban responden telah mewakili dari jawaban seluruh masyarakat Desa Teluk Pambang yang mengatakan bahwa peran kepala desa dalam mengambil keputusan kurang baik disebabkan kepala desa jarang sekali melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan seperti yang telah dijelaskan diatas.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 5.33.**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa**  
**Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa dalam Mengambil**  
**Keputusan dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan**

No	Indikator	Tanggapan Responden			
		Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1	Mengadakan musyawarah	16 (17,02%)	40 (42,55%)	26 (27,66%)	12 (12,77%)
2	Meminta saran/usulan dari masyarakat	5 (5,32%)	27 (28,72%)	48 (51,07%)	14 (14,89%)
3	Memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi	8 (8,51%)	22 (23,41%)	45 (47,87%)	19 (20,21%)
4	Keputusan berdasarkan saran/usulan dari masyarakat	5 (5,32%)	31 (32,98%)	47 (50,00%)	11 (11,70%)
5	Ketegasan kepala desa dengan keputusannya	16 (17,02%)	16 (17,02%)	55 (58,51%)	7 (7,45%)
<b>Persentase</b>		<b>53,19%</b>	<b>144,68%</b>	<b>235,06%</b>	<b>67,02%</b>
<b>Skor</b>		<b>50 x 4</b>	<b>136 x 3</b>	<b>221 x 2</b>	<b>63 x 1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>200</b>	<b>208</b>	<b>442</b>	<b>63</b>

*Sumber : data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti dari subvariabel mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, tanggapan responden yang menyatakan sangat baik totalnya adalah 50 x 4 jumlahnya 200, yang menyatakan baik adalah 136 x 3 jumlahnya adalah 403, yang menyatakan tidak baik totalnya 221 x 2 jumlahnya 442, dan yang menyatakan sangat tidak baik sebanyak 63 x 1 jumlahnya 63.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 5 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang memperoleh skor 1113, dan dinyatakan dalam kategori **Tidak Baik**.

#### 5.3.4. Peran Mengkoordinir Penyelenggaraan Pembangunan

Seorang pemimpin dikatakan baik dalam menjalankan peranannya dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan ketika seorang pemimpin tersebut telah melakukan pembagian tugas kepada aparat dan masyarakat desa, terjun membantu pembangunan dan memfasilitasi sarana dan prasarana serta pelaksanaan tugas oleh masyarakat.

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan beberapa hal baik dari wawancara maupun dari hasil kuisioner pada bulan juli 2012 bahwa :

*Kepala desa tidak disiplin /tidak selalu melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kepala desa lebih sering menyerahkan tugas kepada masyarakat.*

Jika dilihat dari hasil observasi, pembangunan banyak terkendala dari segi sarana dan prasarana. Contohnya pengurangan materi bangunan dan peralatan yang kurang memadai, serta pengerjaan yang tidak teratur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.34.**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa**  
**Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa dalam Mengkoordinir**  
**Penyelenggaraan Pembangunan**

No	Indikator	Tanggapan Responden
----	-----------	---------------------

		<b>Sangat Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Tidak Baik</b>	<b>Sangat Tidak Baik</b>
1	Melakukan pembagian tugas pada aparat	17 (18,09%)	27 (28,72%)	36 (38,30%)	14 (14,89%)
2	Melakukan pembagian tugas pada masyarakat	4 (4,26%)	13 (13,83%)	60 (63,83%)	17 (18,08%)
3	Pelaksanaan tugas dari kepala desa oleh masyarat dan aparat desa	6 (6,39%)	37 (39,36%)	40 (42,55%)	11 (11,70%)
4	Membantu masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	2 (2,13%)	13 (13,83%)	58 (61,70%)	21 (22,34%)
5	Memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan	10 (10,64%)	37 (39,36%)	34 (36,17%)	13 (13,83%)
<b>Persentase</b>		<b>41,51%</b>	<b>135,1%</b>	<b>242,55%</b>	<b>80,84%</b>
<b>Skor</b>		<b>39 x 4</b>	<b>127 x 3</b>	<b>228 x 2</b>	<b>76 x 1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>156</b>	<b>381</b>	<b>456</b>	<b>76</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti dari subvariabel yang mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa, tanggapan responden yang menyatakan sangat baik totalnya 39 x 4 jumlahnya 156, responden yang menyatakan baik totalnya 127 x 3 jumlahnya 381, yang menyatakan tidak baik totalnya 228 x 2 jumlahnya 456, sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak baik totalnya 76 x 1 jumlahnya 76.

Berdasarkan penjumlahan dari 5 indikator yang diteliti maka diketahui bahwa peran kepala desa sebagai administrator pembangunan desa mendapat perolehan skor 1069, dan dinyatakan dalam kategori **Tidak Baik**.

#### 5.3.5. Peran Mengawasi Aktivitas-Aktivitas dalam proses Penyelenggaraan Pembangunan

Dalam hal ini hal yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah mengunjungi lokasi pembangunan, memberikan jalan keluar jika terdapat penyimpangan/kendala, memberikan sanksi kepada orang yang melakukan penyimpangan/kendala, memeriksa kelayakan materi bangunan.

Namun menurut jawaban responden kepala desa belum sempurna melakukan hal tersebut, dalam arti kepala desa kadang melakukan hal tersebut terkadang juga tidak. Oleh karena itulah kepala desa dikatakan kurang berperan dengan baik. Sekretaris desa (Zulham) juga mengatakan hal yang sama terhadap tindakan kepala desa pada tanggal 26 juli 2012 di Desa Teluk Pambang :

*Kepala desa hanya sesekali saja mengunjungi tempat lokasi, bahkan hampir tidak pernah mendatangi lokasi, kepala desa hanya meminta informasi kepada kaur-kaur dan orang yang ditugaskan untuk mengawasi (perangkat desa), Kepala desa jarang sekali memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran malainkan hanya menegurnya saja.*

Selanjutnya kepala desa mengatakan dan memberikan alasan mengapa dia tidak memberikan sanksi kepada warga yang bersalah, hal itu dikarenakan kepala desa segan untuk memberikan hukuman kepada warganya sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.35.**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa dalam Mengawasi Aktivitas-Aktivitas dalam Proses Penyelenggaraan Pembangunan**

No	Indikator	Tanggapan Responden			
		Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1	Datang kelokasi pembangunan	7 (7,45%)	15 (15,96%)	42 (44,68%)	30 (31,91%)
2	Terdapat	12	20	37	25

	penyimpangan/kendala dalam pelaksanaan.	(12,77%)	(21,28%)	(39,36%)	(26,59%)
3	Memberikan jalan keluar dari penyimpangan/kendala	13 (13,84%)	27 (28,72%)	27 (28,72%)	27 (28,72%)
4	Memberikan sanksi kepada yang melakukan penyimpangan/ kendala	15 (15,96%)	13 (13,84%)	38 (40,42%)	28 (29,78%)
5	Memeriksa tingkat kelayakan dari materi bangunan	9 (9,58%)	14 (14,89%)	36 (38,30%)	35 (37,28%)
<b>Persentase</b>		<b>59,6%</b>	<b>94,69%</b>	<b>191,48%</b>	<b>154,28%</b>
<b>Skor</b>		<b>56 x 4</b>	<b>89 x 3</b>	<b>180 x 2</b>	<b>145 x 1</b>
<b>Jumlah</b>		<b>224</b>	<b>267</b>	<b>360</b>	<b>145</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti dari subvariabel mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, tanggapan responden yang menyatakan sangat baik totalnya 56 x 4 dengan jumlah 224, yang menyatakan baik totalnya 89 x 3 dengan jumlah 267, yang menyatakan tidak baik totalnya 180 x 2 jumlahnya 360, serta yang menyatakan sangat tidak baik totalnya 145 x 1 dengan jumlah 145.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 5 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang mendapat perolehan skor 996, dan dapat dinyatakan dalam kategori **Tidak Baik**.

#### **5.4. Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Seluruh Sub Variabel Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut ini :

**Tabel 5.36.**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peran Kepala Desa**  
**Sebagai Administrator Pembangunan Fisik Desa di Desa Teluk**  
**Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

No	Sub Variabel	Tanggapan Responden			
		Sangat Baik	Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1	Membuat perencanaan pembangunan	164 (43,61%)	690 (244,68%)	362 (192,56%)	18 (19,15%)
2	Memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan	208 (55,32%)	528 (187,23%)	396 (210,63%)	44 (46,82%)
3	Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan	200 (53,19%)	408 (144,68%)	442 (235,06%)	63 (67,02%)
4	Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan	156 (41,51%)	381 (135,1%)	456 (242,55%)	76 (80,84%)
5	Mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan	224 (59,56%)	267 (94,69%)	360 (191,48%)	145 (154,28%)
<b>Persentase</b>		<b>253,23%</b>	<b>806,38%</b>	<b>1072,28%</b>	<b>368,11%</b>
<b>Jumlah Skor</b>		<b>952</b>	<b>2274</b>	<b>2016</b>	<b>346</b>
<b>Rata-Rata Skor</b>		<b>190,4</b>	<b>454,8</b>	<b>403,2</b>	<b>69,2</b>
<b>Jumlah Rata-Rata Skor</b>		<b>1117,6</b>			

*Sumber : data Olahan Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas, dapat diketahui dari 5 sub variabel yang diteliti, tanggapan responden yang menyatakan sangat baik memiliki skor 952 dengan rata-rata 190,4, responden yang menyatakan baik memiliki skor 2274 dengan rata-rata 454,8, kemudian responden yang menyatakan tidak baik memiliki skor 2016 dengan rata-rata 403,2, sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak baik memiliki skor sebanyak 346 dengan rata-rata 69,2.

Kemudian berdasarkan penjumlahan rata-rata dari 5 sub variabel yang diteliti, maka diketahui bahwa peran kepala desa sebagai administrator

pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis mendapatkan jumlah skor rata-rata sebesar 1117,6, dan dapat dinyatakan dalam kategori **Tidak Baik**.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, maka kesimpulan dan sarannya adalah sebagai berikut :

#### **6.1. Kesimpulan**

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten bengakalis, penulis mengambil kesimpulan berdasarkan sub variabel penelitian, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

6.1.1. Peran kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan di Desa Teluk Pambang diukur dengan 5 indikator, yaitu :

- a) Memberikan tujuan
- b) Membuat langkah-langkah
- c) Melakukan musyawarah
- d) Melibatkan masyarakat dalam musyawarah
- e) Menanggapi saran/usulan masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukan bahwa dari pengukuran kelima indikator diatas diketahui bahwa peran kepala desa dalam merencanakan pembangunan di Desa Teluk Pambang mendapat perolehan skor 1284, dan dapat disimpulkan peran kepala desa tidak baik hal ini sesuai dengan **Tabel 5.31**.



6.1.2. Peran kepala desa dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Teluk Pambang dapat diukur dengan 5 indikator sebagai berikut :

- a. Mengikutsertakan masyarakat untuk berrpartisipasi
- b. Mengendalikan aparat dan masyarakat
- c. Memberikan arahan kepada aparat dan masyarakat
- d. Membentuk kelompok-kelompok kerja
- e. Partisipasi dari masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menyatakan bahwa dari pengukuran kelima indikator diatas diketahui peran kepala desa dalam memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan di Desa Teluk Pambang mendapat perolehan skor 1176 (**Tabel 5.32**) dan dinyatakan kedalam kategori peran kepala desa yang tidak baik.

6.1.3. Peran kepala desa dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang dapat diukur dengan 5 indikator sebagai berikut :

- a. Mengadakan musyawarah
- b. Meminta saran/usulan dari masyarakat
- c. Memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi
- d. Keputusan berdasarkan saran/usulan dari masyarakat
- e. Ketegasan kepala desa dengan keputusannya

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukan bahwa dari pengukuran kelima indikator diatas diketahui peran kepala desa

dalam mengambil keputusan pada proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang mendapatkan perolehan skor 1113 dan dinyatakan kedalam kategori peran kepala desa yang tidak baik(**Tabel 5.33**).

6.1.4. Peran mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dapat diukur melalui 5 indikator yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pembagian tugas pada aparat desa
- b. Melakukan pembagian tugas pada masyarakat desa
- c. Pelaksanaan tugas dari kepala desa oleh masyarakat dan aparat desa
- d. Membantu masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- e. Memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukan bahwa dari pengukuran ke 5 indikator diatas, diketahui bahwa peran kepala desa dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang mendapat perolehan skor 1069, dan dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa tidak baik (**Tabel 5.4**).

6.1.5. Peran kepala desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dapat diukur dengan 5 indikator sebagai berikut :

- a. Datang kelokasi pembangunan
- b. Terdapat penyimpangan/kendala dalam pelaksanaan
- c. Memberikan jalan keluar dari penyimpangan/kendala
- d. Memberikan sanksi kepada yang melakukan penyimpangan/kendala

- e. Memeriksa tingkat kelayakan dari materi bangunan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukan bahwa dari pengukuran kelima indikator diatas diketahui bahwa peran kepala desa dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Teluk Pambang mendapat perolehan skor 996 (**Tabel 5.35**) dan dapat disimpulkan peran kepala desa tidak baik.

Secara keseluruhan dari pelaksanaan peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis mendapatkan perolehan skor rata-rata 1117,6 dan dinyatakan dalam kategori tridak baik, hal ini sesuai dengan penjelasan dari rekapitulasi tanggapan responden mengenai peran kepala desa sebagai administrator pembangunan fisik desa di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis pada **tabel 5.36**.

## **6.2. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada kepala desa beserta pemerintah desa demi tercapainya tujuan pembangunan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam membuat perencanaan pembangunan diharapkan kepala desa untuk melibatkan aparat beserta masyarakat desa, sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.

- b. Dalam memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan serta mengendalikan masyarakat beserta aparat agar selalu berkerjasama dalam kegiatan pembangunan.
- c. Dalam mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan sebaiknya kepala desa melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah, kemudian memberikan alternatif-alternatif dari kemungkinan yang terjadi serta tegas dengan keputusan yang telah diambil.
- d. Dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa hendaknya membentuk tugas pada elemen-elemen masyarakat dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.
- e. Dalam mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa hendaknya selalu mengontrol kegiatan dari pembangunan baik pelaksana maupun materi bangunan serta segera menindaklanjuti bila ada penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta.
- AW. Widjaja, H. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- D. Ratna Willis. 1996. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta : Erlangga.
- Hasan. 2009. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Bina Jaya
- Husein, Umar. 2005. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (Skripsi Yayan Tri Wahyudi)
- Janah, Lailia Fatkul. 2009. *Teori Peran Mustafa*. Jakarta : Acarya Media Utama
- Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta : Yayasan Obor (skripsi Yayan Tri Wahyudi)
- Moenir, A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara (Skripsi Budi waluyo)
- Ndraha, Talidzuhu. 2005. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara (Skripsi Yuyun Tri wahyuni)
- Nugroho dan Dahuri. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia.
- Rivai Veitzhal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian Sandang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

- Simon, Herbert A. 1990. *Administrative Behavior*. Jakarta. Bumi Aksara
- Sondang, P. siagian. 2003. *Filsafat Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Stephen P. Robbins. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta : Arcan
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *SANRI (Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia)*. Jakarta : Bumi aksara.
- Thoha. Miftah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Usman, Husaini, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Jakarta : Larela Pustaka Utama
- Widjadja Haw. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Referensi Lain:**

Al-Qur'an. Surat Al-baqarah jus 1 Ayat 30.

<http://pakarbisononline.blogspot.com/2010/01/pengertian-kepemimpinan.html>. 03/02/12.

<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan.html>. 03/02/12.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

[www.docstoc.com/docs/27173158/pengaruh-gaya-kepemimpinan-terhadap-peningkatan-produktivitas-kerja.html](http://www.docstoc.com/docs/27173158/pengaruh-gaya-kepemimpinan-terhadap-peningkatan-produktivitas-kerja.html). 03/02/12.